



**LAPORAN ANEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
SATKER POLRES MEMPAWAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Kepolisian di negara Republik Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam memelihara situasi keamanan dan ketertiban. Saat ini institusi Polri di Polres Mempawah memiliki satuan kewilayahan sebanyak 8 (delapan) Kepolisian Sektor (Polsek) dan 1 (satu) Polsubsektor, hal ini seiring sistem pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu keberadaan Kepolisian Resor Mempawah, memegang peran penting dalam memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di Kabupaten Mempawah. Hal ini tidak lepas dari dukungan dalam mewujudkan sasaran strategis Polres Mempawah. Maka laporan kinerja triwulan I Tahun 2023 Polres Mempawah, menjadi salah satu syarat penting dalam keberhasilan Polres Mempawah dalam menjalankan amanat Undang-undang Kepolisian.

Dalam sistem perencanaan Polri, tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Polres 2020-2024. Renstra Polres Mempawah dihadapkan pada permasalahan sangat kompleks dan terkait dengan berbagai pemangku kepentingan pada skala lokal kedaerahan, yang berdampak pada situasi keamanan Kabupaten maupun secara Provinsi. Situasi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain; secara internal evaluasi terhadap tataran struktur organisasi tingkat Polres dan Polsek yang dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, sehingga fungsi dan ukuran organisasi yang perlu penyesuaian; pola pikir dan budaya kerja yang belum berorientasi pada kinerja; implementasi kebijakan organisasi yang belum optimal; kualitas pelayanan kepolisian yang perlu ditingkatkan, terlebih pelayanan administrasi kepolisian sebagai layanan dasar publik, seperti pada pelayanan di SPKT, pelayanan SKCK, pelayanan Satpas dan pelayanan Samsat.

Sedangkan pada sisi lain secara eksternal, pada Kalender kamtibmas yang terjadi selama tahun 2023 ini juga menuntut adanya kerja keras Kepolisian Resor Mempawah dalam upaya pengamanan, perlindungan dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta kondisi kamtibmas yang kondusif seperti dan kegiatan rutin tahunan yaitu perayaan hari raya Idul Fitri dan Natal dan pengamanan pemilihan kepala desa pada 7 desa dan persiapan pengamanan pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden pada tahun 2023 – 2024, serta situasi global yang ditandai dengan banyak dan mudahnya saluran masyarakat untuk menyerap informasi dan budaya global tanpa batas. Hal ini lambat laun akan meruntuhkan tatanan sendi kehidupan empat pilar bangsa, ditambah lagi budaya permisif dan mudah dipicunya masyarakat dengan isu yang memancing terjadinya konflik sosial yang bernuansa perselisihan sosial budaya, SARA, batas wilayah dan sumber daya alam. Kesemua itu distimulan akibat tekanan kebutuhan hidup, keterpurukan ekonomi sehingga timbul persaingan yang tidak sehat, disamping itu bertambahnya jumlah penduduk.

Trend indeks pembangunan manusia (IPM) 2023 menunjukkan Kabupaten Mempawah memiliki nilai IPM dengan kategori sedang yakni sebesar 66,94, hal ini menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Mempawah telah mengalami perubahan sosial, namun kondisi ini masih berpengaruh terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang paling mudah yaitu melakukan penyimpangan sosial, diantaranya menjadi pelaku tindak pidana khususnya penyeludupan barang illegal dan kasus C3. Dari fakta situasional tersebut di atas, maka aktualisasi tupoksi Polri baik pelayanan administrasi kepolisian, maupun tindakan operasional kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif dan tindakan represif yang dilakukan Polres Mempawah, harus terus dipacu untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Terhadap kompleksitas permasalahan dan beragam keinginan masyarakat tersebut, khususnya peningkatan pelayanan dan umumnya optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan, menjadi salah satu pertimbangan penting Polres Mempawah untuk melakukan introspeksi dan berbenah diri, guna memantapkan jati diri Polri. Maka melalui Laporan Capaian Kinerja Polres Mempawah yang dibuat setiap triwulan ini, merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dari segenap personel kepolisian Resor Mempawah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Perpol nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dimana dalam peraturan tersebut diterangkan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian Resor, dan struktur organisasi Polres Mempawah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- b) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- c) menegakan hukum.

Selanjutnya Kepolisian Resor adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut:

- a) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian, untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

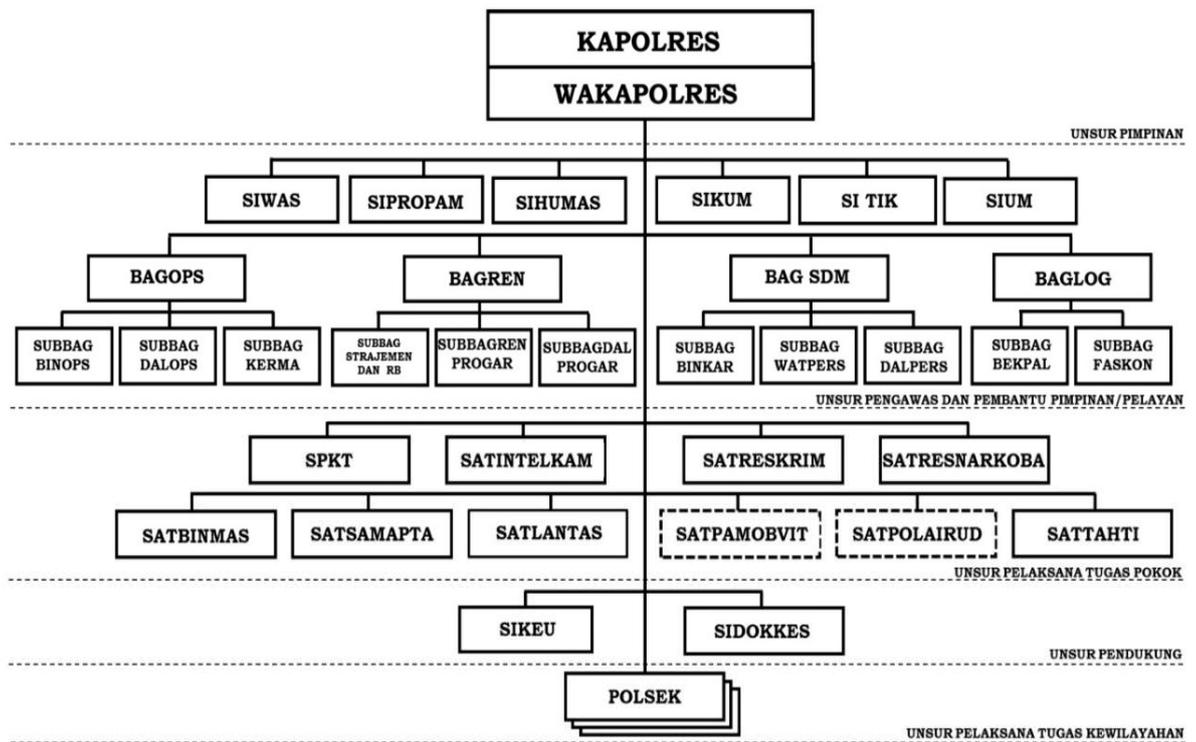
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perpol Nomor 2 Tahun 2021, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a) pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d) pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e) pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
- f) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
- h) pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi tingkat Polres



Keterangan: Khusus unit organisasi Satlantasi pada Polres Tipe B yang berkedudukan di Polda Metro Jaya, pembinaan dan operasional dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

4. Peran Strategis

Kabupaten Mempawah adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak diantara pada 0°42' lintang Utara dan 0°00,4' Lintang Selatan serta 108°34' Bujur Timur dan 109°22' Bujur Timur. Kabupaten Mempawah adalah salah satu daerah hujan dengan intensitas tinggi yang dipengaruhi oleh daerahnya yang memiliki hutan tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi sehingga bencana alam banjir, angin puting beliung, kebakaran lahan dan hutan hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah memiliki luas wilayah sebesar 2.797,88 Km². Daerah Pemerintahan Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 60 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 453,58 km² atau 16,21% sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas sebesar 124,079 km² atau 4,43% dari luas wilayah Kabupaten Mempawah.

Tugas dalam perumusan kebijakan dipandang sangat strategis, karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang akan digunakan institusi Polri sebagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas preventif dan represif di wilayah hukum Polres Mempawah. Oleh karena itu dalam menyiapkan kebijakan dan instrumen harus

dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam menyiapkan kebijakan akan memiliki dampak yang besar bagi kegagalan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan juga tidak kalah pentingnya karena terkait dengan bagaimana kebijakan yang akan digunakan institusi Polri sebagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas preventif dan represif di wilayah hukum Polres Mempawah dapat diimplementasikan oleh semua satuan kerja dan satuan kewilayahan di lingkungan Polres Mempawah sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Polres Mempawah dapat melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian di Kabupaten Mempawah harus mampu berperan sebagai penggerak (*trigger mechanism*).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis Polres Mempawah tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi. Polres Mempawah merupakan bagian dari Polri sebagai institusi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polres Mempawah, guna mewujudkan personel Polri yang profesional, modern dan terpercaya dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal, yang diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam menegakkan hukum yang profesional dan proporsional.

A. Visi Polres Mempawah

“Terwujudnya Mempawah yang aman dan tertib”.

B. Misi Polres Mempawah

“Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat Mempawah”.

C. Tujuan Jangka Menengah Polres Mempawah

1. Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Mempawah;
2. Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
3. Modernisasi Pelayanan Polres Mempawah;
4. Mewujudkan Polres Mempawah yang Profesional;
5. Menerapkan Manajemen Polres Mempawah yang terintegrasi dan Terpercaya.

D. Sasaran Prioritas

Berdasarkan Sasaran Prioritas Polri tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam surat edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2023, maka Polres Mempawah menetapkan sasaran prioritas sebagai berikut:

1. **Pertama:** “Harkamtibmas yang Kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Kabupaten Mempawah”
2. **Kedua:** “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polres Mempawah”;
3. **Ketiga:** “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”;

4. **Keempat:** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Mempawah”;
5. **Kelima:** “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern”;
6. **Keenam:** “Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”.

E. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Polres Mempawah diklasifikasikan ke dalam tiga perspektif, yang mengacu pada metode **Balanced Scorecard (BSC)** yang digunakan. Adapun ketiga perspektif tersebut meliputi **Stakeholder Perspective** (mengarah pada sasaran strategis utama yaitu terciptanya Keamanan dan Ketertiban Provinsi), **Internal Process Perspective** (mencakup sasaran strategis dalam bidang harkamtibmas, dan penegakan hukum), serta **Learning and Growth Perspective** (mencakup sasaran strategis dalam bidang inovasi dan akuntabilitas kinerja). Dalam setiap sasaran strategis yang terdapat pada ketiga perspektif ini terkandung berbagai indikator kinerja yang relevan yang diarahkan dapat mendukung pencapaian kinerja Polres Mempawah dan Polri secara keseluruhan.

1. Stakeholder Perspective

Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian *impact* yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Polres Mempawah”. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Mempawah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polres Mempawah dibangun dengan 2 Indikator Kinerja Pendukung (IKP) pada *Internal Process Perspective*.

2. Internal Process Perspective

Sudut pandang proses internal merupakan jabaran dari misi Polri LinYanYom (Melindung, Melayani, Mengayomi) Masyarakat. Terdapat dua sasaran strategis antara lain:

- a. Sasaran strategis kesatu (SS1) yaitu “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Harkamtibmas);
- b. Sasaran strategis ketiga (SS 2) yaitu “Penegakkan Hukum secara Berkeadilan”, di mana keberhasilan sasaran strategi ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Hukum (Gakkum).

3. Learning And Growth Perspective

Sudut pandang Pembelajaran dan pertumbuhan merupakan kumpulan sasaran strategis yang merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis di atas dapat tercapai. Semangat inovasi di tubuh Polri ini terdiri dari tiga sasaran strategis antara lain:

- a. Sasaran strategis ke tiga (SS3) yaitu "Profesionalisme SDM Polres Mempawah", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:
 - Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah;
- b. Sasaran strategis keempat (SS4) yaitu "Modernisasi Teknologi Polres Mempawah", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:
 - 1) persentase pemenuhan alkom Polres Mempawah;
 - 2) persentase Almatsus Polres Mempawah ;
 - 3) persepsi kemudahan Akses Data.
- c. Sasaran strategis ke lima (SS5) yaitu "Sistem Pengawasan Polres Mempawah yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
 - 1) Nilai AKIP;
 - 2) Nilai RBP;
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran;
 - 4) Persentase penanganan pengaduan masyarakat;
 - 5) Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Mempawah.

F. Arah Kebijakan

1. **Tujuan 1:** Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Seluruh Wilayah Kabupaten Mempawah

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Polres Mempawah	Peningkatan kehadiran Polri pada 2 Lokasi prioritas (Lokpon) Toho dan Sadaniang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi prioritas • Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah Lokasi Prioritas (darat).

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya. • Melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya. • Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya. • Polsek sebagai Lini terdepan Harkamtibmas
	Meningkatkan keamanan wilayah Perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan wilayah perairan. • Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan perairan.
	Peningkatan disiplin berlalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas • Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan Raya • Menintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat polsek sampai tingkat Polres
	Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Tomas dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas. • Partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Tujuan 2: Modernisasi Pelayanan Polres Mempawah

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terselenggaranya layanan publik Polres Mempawah yang prima	Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan inovasi pelayanan Polres Mempawah. • Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan pers Polres Mempawah dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan.
Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini	Modernisasi sarana dan prasarana Polres Mempawah	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana
		<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi sarana dan prasarana operasional dan pelayanan Polres Mempawah

3. Tujuan 3: Menegakkan Hukum secara Berkeadilan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan	Peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, siber, korupsi dan kasus atensi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum • Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah • Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana Narkoba, siber, korupsi dan kasus atensi publik
	Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam perlindungan perempuan dan anak • Melanjutkan pembangunan Ruang pelayanan khusus perempuan dan anak

4. Tujuan 4: Mewujudkan Polres Mempawah yang Profesional

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal	Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen Media	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif dalam membangun kepercayaan publik. • Menetralsir berita negatif yang dapat mengganggu kamtibmas.
Terwujudnya SDM Polri yang profesional	Peningkatan kualitas SDM Polres Mempawah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reformasi • pengelolaan SDM secara profesional • Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri. • Meningkatkan kesejahteraan SDM.

5. Tujuan 5: Menerapkan Manajemen Polres Mempawah yang terintegrasi dan terpercaya

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal. • Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri. • Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif	Penguatan regulasi Polri	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kerangka regulasi Polri Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif
Terwujudnya profesional SDM Polres Mempawah	Peningkatan kualitas SDM Polres Mempawah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri. Meningkatkan kesejahteraan SDM.
Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran	Peningkatan nilai kinerja anggaran (IKPA)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monev setiap bulan pada Sub satker jajaran Polres .

G. Penetapan Kinerja Polres Mempawah TA. 2023

Perjanjian Kinerja Polres Mempawah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri. Hal ini merupakan tekad dan janji akan dicapai antar pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja Polres Mempawah TA. 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja Polres Mempawah tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2023
SI	Keamanan dan Ketertiban Mempawah	IKU	Indeks Keamanan dan Ketertiban Mempawah	4,3
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IKU 1	Indeks Harkamtibmas	91,73
SS2	Penegakan Hukum secara Berkeadilan	IKU 2	Indeks Gakkum	93,99
SS3	Profesionalisme SDM Polres Mempawah	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah	84,3
SS4	Modernisasi Teknologi Polres Mempawah	IKP2	Persentase Pemenuhan Alkom Polres Mempawah	90%
		IKP3	Persentase Almatsus Polres Mempawah	90%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
				2023
		IKP4	Persepsi kemudahan akses Data	4
SS5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP5	Nilai AKIP	78
		IKP6	Nilai Reformasi Birokrasi	85
		IKP7	Nilai Kinerja Anggaran	99
		IKP8	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100%
		IKP9	Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100%

H. Rencana Aksi T.A. 2023

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas Polres Mempawah, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Polres Mempawah tahun 2023. Adapun rencana aksi Polres Mempawah T.A. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Rencana Aksi Polres Mempawah TA. 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023					Ket
			TAHUN	TW 1	TW2	TW3	TW4	
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Harkamtibmas	91,73	22,20	22,30	22,93	24,30	
2.	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan	Indeks penegakan hukum	93,99	23,10	23,49	23,60	23,80	
3.	Profesionalisme SDM Polres Mempawah	Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah	84,30	20	20	22,10	22,20	
4.	Modernisasi Teknologi	a.Persentase Pemenuhan Alkom Polres Mempawah	90%	-	45%	-	45%	
		b.Persentase Almatsus Polres Mempawah	90%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	
		c.Persepsi kemudahan akses data	4	-	4	-	4	Sama tiap triwulan karena indeks survey tidak bisa dibagi per triwulan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023					Ket
			TAHUN	TW 1	TW2	TW3	TW4	
5.	Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	Nilai AKIP	78	-	78	-	-	Tidak bisa di bagi tiap TW dikarenakan penilaian sekali dalam setahun
		Nilai Reformasi Birokrasi.	85	-	-	-	85	Tidak bisa di bagi tiap TW dikarenakan penilaian sekali dalam setahun
		Nilai Kinerja Anggaran	99	99	99	99	99	Sama tiap triwulan karena indeks tidak bisa dibagi pertriwulan
		Presentase penanganan pengaduan masyarakat;	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri.	100%	100%	100%	100%	100%	

I. Anggaran DIPA T.A. 2023

Target Polres Mempawah yang hendak dicapai pada TA. 2023 merupakan target tahun keempat dari Renstra Polres Mempawah tahun 2020-2024. Adapun jumlah anggaran yang tersedia untuk Polres Mempawah menurut DIPA TA. 2023 adalah sebesar Rp. 52.244.860.000,- (Lima puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari atas 4 (empat) program, yaitu:

Tabel 3.

Pagu Polres Mempawah per Program T.A. 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Lidik Sidik Tindak Pidana	Rp. 3.467.786.000
2.	Program Modernisasi Almatsus Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	Rp. 3.217.690.000
3.	Program Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Rp. 8.339.363.000
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 37.220.021.000
	Jumlah	Rp. 52.244.860.000

1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

a) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b) Kegiatan:

- 1) penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140);

- 2) penyelenggaraan Laboratorium Forensik (3141);
- 3) penindakan Tindak Pidana Umum (3142);
- 4) penindakan Tindak Pidana Narkoba (3144);
- 5) penindakan Tindak Pidana Korupsi (3146);
- 6) Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas (4343);
- 7) pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (5082);

2. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

a) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

b) Kegiatan:

dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras (5059);

3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif.

b) Kegiatan:

- 1) analisis Keamanan (3112);
- 2) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik (3114);
- 3) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi (3115);
- 4) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosial Budaya (3116);
- 5) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Keamanan Negara (3117);
- 6) dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (3128);
- 7) pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara (3130);
- 8) penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital (3131);
- 9) peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di bidang Lintas (3133);
- 10) pembinaan Potensi Keamanan (5076);
- 11) pengendalian Operasi Kepolisian (5080);

4. Program Dukungan Manajemen

a) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor;

b) Kegiatan:

- 1) penerangan Masyarakat (3070);
- 2) dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073);
- 3) pertanggungjawaban Profesi (3088);
- 4) penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri (3089);
- 5) penegakan tata tertib dan disiplin Polri (3090);
- 6) penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan (3091);
- 7) pemberian bantuan dan nasihat Hukum (3154);
- 8) penyusunan dan penyuluhan Hukum (3155);
- 9) reformasi Birokrasi Polri (5053);
- 10) manajemen Anggaran (5054);
- 11) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (5056).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Polres Mempawah

Akuntabilitas kinerja Polres Mempawah merupakan kinerja secara kolektif yang diperoleh dari subsatker dan Polsek jajaran dengan didasari atas Perjanjian Kinerja seluruh level yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga diperoleh capaian kinerja triwulan I Polres Mempawah Tahun 2023 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.

Capaian Kinerja Triwulan I T.A. 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI					CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	2023	
	Keamanan dan Ketertiban Kabupaten	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten	4,3	1,9					44%
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas Polres Mempawah	91,73	60,97					66,4%
2.	Penegakan Hukum secara Berkeadilan	Indeks Gakkum Polres Mempawah	93,99	23,63					25,1%
3.	Profesionalisme SDM Polres Mempawah	Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah	84,30	24,7					29,3%
4.	Modernisasi Teknologi Polres Mempawah	Persentase Pemenuhan Alkom	90%	0%					0%
		Persentase pemenuhan Almitsus	90%	1%					1,1%
		Persepsi kemudahan Akses Data	4	0					0%
5.	Pengawasan Polres Mempawah yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	Nilai AKIP	78	0					0%
		Nilai Reformasi Birokrasi	85	0					0%
		Nilai Kinerja Anggaran	99	98,67					99,6%
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100% (6 kasus)	33,3% (2 kasus)					0,00%
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100%	0%					0,00%

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capai kinerja dari masing-masing sasaran strategis untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan kendala kegagalan dan keberhasilan sesuai dengan pernyataan perjanjian kinerja T.A. 2023, dijelaskan sebagai berikut :

1. Stakeholder Perspective

Sasaran Impact (SI):

Keamanan dan Ketertiban Kabupaten.

Sasaran Impact terwujudnya keamanan dan ketertiban Mempawah, memiliki satu indikator kinerja yakni Indeks Keamanan dan Ketertiban Mempawah.

Meningkatnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam 4 Pasal yaitu : Pasal 2, 4, 5 dan 13, yang diartikan sebagai suatu situasi keamanan dimana masyarakat terjaga, terawat, terpelihara, selamat, terhindar dari mara bahaya serta tingkat terlindunginya masyarakat dari berbagai macam ancaman keamanan, perasaan aman dan nyaman secara psikis masyarakat dengan keberadaan atau kehadiran Polri di tengah masyarakat serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Sehingga Polres Mempawah memberikan perhatian penuh kepada perspektif stakeholder ini.

Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten adalah suatu indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi utama pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Harkamtibmas (56%) dan Indeks Gakkum (44%). Adapun formula perhitungan indikator indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten adalah:

Keterangan:

IK : Indeks Kamtibmas

IH : Indeks Harkamtibmas

W_{IH} : Bobot Indeks Harkamtibmas (56%)

W_{IG} : Bobot Indeks Gakkum Polri (44%)

Hasil perhitungan dilakukan dengan ketentuan setiap komponen pada masing-masing Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum dilakukan pembobotan tanpa dikalikan dengan 20.

Tabel 5.

Konversi Nilai Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten

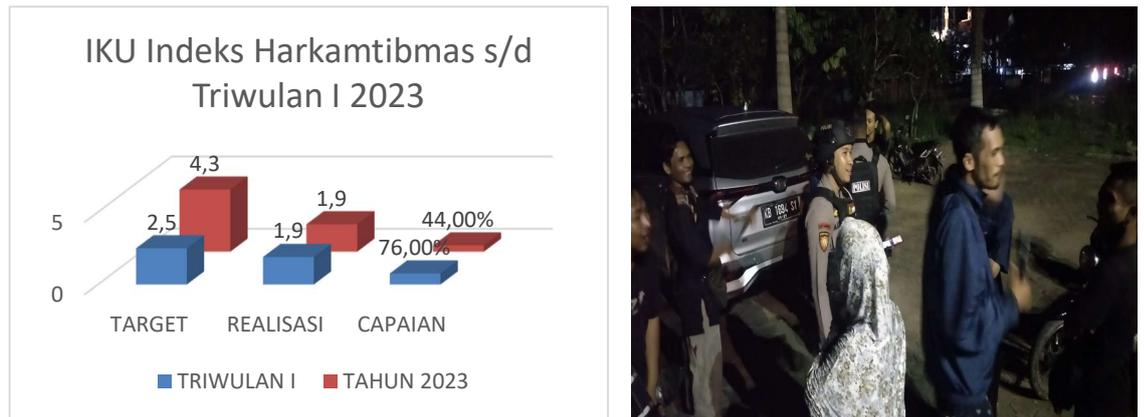
Distribusi Skor per Level Kinerja	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 – 5,0

capaian dari Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten pada triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Capaian kinerja IKU Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten
Triwulan I Tahun 2023

SI	Keamanan dan Ketertiban Kabupaten				
IKU	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten				
TRIWULAN I			TAHUN 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2,5	1,9	76%	4,3	1,9	44%

Grafik 1.
Capaian kinerja IKU Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten
Triwulan I Tahun 2023



Hasil analisa dan evaluasi capaian pada Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten dapat dijelaskan pada triwulan I tahun 2023 terealisasi 1,9 (76%) dari target pada triwulan I tahun 2023 sebesar 2,5, sedangkan target tahun 2023 sebesar 4,3 berhasil terealisasi sebesar 1,9 (44%). Dengan menggunakan polarisasi *Maksimize* maka kinerja Polres Mempawah pada Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten pada Triwulan I belum optimal karena masih terdapat dua indikator kinerja utama belum mencapai realisasi sesuai target yang diinginkan yaitu pada Indeks Harkamtibmas pada Triwulan I terealisasi sebesar 60,97 (66,4%) dan Indeks Gakkum pada Triwulan I yang terealisasi sebesar 23,63 (25%).

2. Internal Process Persepctive

Sasaran Strategis (SS1)

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kondisi performa kinerja yang ingin diwujudkan oleh seluruh komponen personel Polres Mempawah dalam melaksanakan tupoksi kepolisian dalam struktur hubungan tata cara kerja organisasi yang harmonis dan saling sinergis terstruktur. Adapun indikator yang diukur dalam sasaran ini adalah indeks harkamtibmas. Selanjutnya terhadap capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU-1 Indeks Harkamtibmas

Indeks Harkamtibmas merupakan pengukuran kinerja Polri untuk melakukan upaya pencegahan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Indeks ini terdiri dari penghitungan delapan komponen yang sudah dibobotkan sebagai berikut:

Tabel 7.
Komponen Indeks Hakamtibmas yang sudah dibobotkan

Komponen	Bobot
<i>Road safety indeks</i>	7,75%
<i>Indeks community policing</i>	9,47%
Response time kehadiran Polres Mempawah di TKP	21,37%
Tingkat keamanan di jalur perairan daerah hukum Polres Mempawah	9,51%
Persentase Pemenuhan Pengamanan Obvit dan target rentan	15,69%
Persentase penanganan reduksi potensi gangguan	8,83%
Crime Rate	27,47%

Konversi nilai dari masing-masing komponen indeks:

Tabel 8.
Konversi Nilai Komponen Indeks Harkamtibmas

Komponen Indeks	Nilai Indeks				
	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
<i>Road safety index</i>	< 10 %	10 % - < 30 %	30 % - < 50 %	50 % - < 80 %	≥ 80 %
<i>Indeks Community Policing</i>	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %
Response time kehadiran Polres Mempawah di TKP	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %
Tingkat keamanan di jalur perairan daerah hukum Polres Mempawah	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %
Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %
Persentase penurunan potensi gangguan	< 10 %	10 % - < 30 %	30 % - < 50 %	50 % - < 80 %	≥ 80 %
Crime Rate	>40	>35 – 40	>30 -35	>25 -30	≤25

Seluruh nilai konversi dilakukan pembobotan berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$IH = 20 \times \sum_{i=1}^7 w_i X_i$$

Keterangan:

IH : Indeks Harkamtibmas Polres Mempawah

X_1 s.d. X_7 : nilai masing-masing variable Indeks Harkamtibmas

w_1 s.d. w_7 : bobot masing-masing variable Indeks Harkamtibmas

Catatan: Adanya pengali berupa konstanta 20 mengingat Indeks Harkamtibmas menggunakan skala 1 - 5, sedangkan Indeks Harkamtibmas menggunakan skala 1 - 100.

Tabel 9. Data Distribusi Skor Level Kinerja Indeks Harkamtibmas

Distribusi Skor per Level Kinerja	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Harkamtibmas	20 – < 40	40 – < 60	60 – < 80	80 - < 90	90 – 100

Dapat dilihat bahwa elemen dari indeks harkamtibmas adalah Road Safety Index, Index Community Policing, Response Time kehadiran Polres Mempawah di TKP, Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan, Persentase penurunan potensi gangguan dan Crime Rate. Adapun capaian dari indeks penegakan hukum ini setelah dilakukan pembobotan pada tabel diatas sebagai berikut:

Tabel 10.
Capaian kinerja IKU Indeks Harkamtibmas Triwulan I Tahun 2023

SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
IKU-1	Indeks Harkamtibmas			
TRIWULAN I		TAHUN 2023		
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
22,20	60,97	91,73	60,97	66,4%

Grafik 2.
Capaian kinerja IKU Indeks Harkamtibmas Triwulan I Tahun 2023



Hasil analisa dan evaluasi capaian pada Indeks Harkamtibmas dapat dijelaskan pada triwulan I tahun 2023 terealisasi 60,97 dari target pada triwulan I tahun 2023 sebesar 22,20, sedangkan target tahun 2023 sebesar 91,73 berhasil terealisasi sebesar 60,97 (66,4%). Dengan menggunakan polarisasi *Maksimize* maka kinerja Polres Mempawah pada Indeks Harkamtibmas belum tercapai maksimal dimana terdapat beberapa komponen yang tidak mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan meliputi komponen road safety indeks yaitu target 1,5 realisasi 0,1,

komponen indeks community policing yaitu belum ada penambahan jumlah riil bhabinkamtibmas dimana target jumlah bhabinkamtibmas yaitu sebanyak 55 personil bhabinkamtibmas terealisasi sebanyak 45 personil bhabinkamtibmas, komponen persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan yaitu pada jumlah realisasi kegiatan pengamanan dengan target sebanyak 240 kali terealisasi sebanyak 132 kali, komponen persentase kemampuan reduksi potensi gangguan yaitu pada proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang dengan target sebanyak 3.260 potensi gangguan terealisasi sebanyak 313 potensi gangguan dan pada jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang dengan target sebanyak 378 jumlah kejadian terealisasi sebanyak 50 jumlah kejadian dan komponen crime rate yaitu pada jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan dengan target sebanyak 267 kasus terealisasi sebanyak 50 kasus.

Secara rinci capaian indikator kinerja utama Indeks Harkamtibmas pada tabel berikut ini:

Tabel 11.
Capaian kinerja IKU Indeks Harkamtibmas Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja dan Parameter untuk perhitungan indicator kinerja	Bobot (%)	Data Capaian			Pembobotan		
		Target 2023	Real TW I	%	Target 2023	Real TW I	%
Road Safety Index	7,75	1,40	0,10	7,14	0,11	0,01	12,00
Indeks Community Policing	9,47	4,7	4,5	95,7	0,45	0,43	71,69
Response Time kehadiran Polisi di TKP	21,37	3,3	3,3	100	0,71	0,71	17,68
Tingkat keamanan di jalur perairan daerah hukum Polres Mempawah	9,51	10	10	100	0,95	0,95	17,68
Persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan	15,69	4,5	2,40	53,3	0,71	0,38	23,37
Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan	8,83	4,3	4,1	95,3	0,38	0,36	20,59
Crime Rate	27,47	4,7	0,8	17	1,29	0,22	37,48
NILAI INDEKS HARKAMTIBMAS					91,73	60,97	66,4%

Dapat dilihat pada tabel diatas capaian dari setiap indikator dalam indeks harkamtibmas pada triwulan I tahun 2023. Capaian komponen yang paling rendah yaitu road safety index karena komponen road safety indeks menggunakan pola minimize yaitu semakin kecil semakin baik maka capaian pada komponen road safety index dinilai berhasil sedangkan capaian komponen yang paling tinggi yaitu komponen Response Time kehadiran Polisi di TKP dan Tingkat keamanan di jalur perairan daerah hukum Polres Mempawah. Hal ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a) Road Safety Index

Road Safety Index (RSI) atau indeks keselamatan berlalu-lintas mengukur tingkat keamanan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara,

dihitung dari agregat nilai indeks dua variable, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100 ribu penduduk dan jumlah kematian akibat kecelakaan per 10 ribu kendaraan. Untuk Formula Indikator yang sudah dibobatkan sebagai berikut:

$$RSI = \frac{X_{indeks} + Y_{indeks}}{2}; \quad X = \frac{M \times 100.000}{P}; \quad Y = \frac{M \times 10.000}{K}$$

Keterangan:

RSI : *Road Safety Indeks*

X : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk.

Y : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan.

M : Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu.

P : Populasi penduduk di wilayah tertentu

K : Jumlah kendaraan bermotor di wilayah tertentu

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 12.
Konversi Nilai Indikator Road Safety Index

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)		1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
		Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	TW I	> 5,00	> 3,75 – 5,00	> 2,50 – 3,75	> 1,25 – 2,50	≤ 1,25
	TW II	> 10,00	> 7,50 – 10,00	> 5,00 – 7,50	> 2,50 – 5,00	≤ 2,50
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan	TW I	> 0,75	> 0,58 – 0,75	> 0,38 – 0,58	> 0,18 – 0,38	≤ 0,18
	TW II	> 1,50	> 1,15 – 1,50	> 0,75 – 1,15	> 0,35 – 0,75	≤ 0,35
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	TW I	> 5,00	> 3,75 – 5,00	> 2,50 – 3,75	> 1,25 – 2,50	≤ 1,25
	TW IV	> 5,00	> 3,75 – 5,00	> 2,50 – 3,75	> 1,25 – 2,50	≤ 1,25
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan	TW I	> 2,25	> 1,73 – 2,25	> 1,13 – 1,73	> 0,53 – 1,13	≤ 0,53
	TW IV	> 3,00	> 2,30 – 3,00	> 1,50 – 2,30	> 0,70 – 1,50	≤ 0,70

Hasil konversi per triwulan diatas untuk kemudian digabung dengan hasil konversi nilai dari komponen Indeks Harkamtibmas lainnya. Nilai capaian indeks keselamatan di jalan sebagai berikut:

Tabel 13.
Analisis capaian Road Safety Index Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	TAHUN 2023		
		TARGET	REAL TW I	%
1	Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk (X)	11	4	36,3%
2	Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas (M)	30	10	33,3%
3	Populasi penduduk	275.325	271.625	98,6%

4	Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan (Y)	48	16	33,3%
5	Jumlah kendaraan bermotor (K)	6.206	6.206	100%
NILAI RSI		30	10	33,3%
NILAI KONVERSI		1,5	0,1	6,66%

Grafik 3.
Analisis capaian Road Safety Index Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan Lalu Lintas pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 1,5 telah terealisasi sebesar 0,1 dengan capaian kinerja sebesar 6,6%, mengingat polarisasi ini adalah *minimize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satlantas pada Triwulan I mengalami peningkatan dengan ditandainya menurun jauh jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dari target yang telah ditentukan sebesar 30 orang, berhasil terealisasi sebanyak 10 orang, kinerja Satlantas Polres Mempawah sangat optimal dikarenakan jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas masih berada dibawah target yang ditentukan dimana target jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 sebanyak 30 orang maka sampai dengan triwulan I tahun 2023 terealisasi sebesar 10 orang. berdasarkan data tersebut, kinerja Satlantas pada triwulan I tahun 2023 ini mengalami peningkatan atau sudah sangat optimal, hal ini dapat disebabkan beberapa hal yaitu :

- 1) terpenuhi dukungan anggaran secara proposional dan mencukupi dalam mendukung pelaksanaan operasional satuan lalu lintas Polres Mempawah pada kegiatan-kegiatan preemtif dan preventif serta gakkum lantas, sehingga pelaksanaan kegiatan satuan lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;

- 2) terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana berupa Gedung kantor Satlantas, kendaraan patrol baik roda 2 maupun roda 4 yang juga dapat membantu mobilitas personel satlantas dalam melaksanakan tupoksinya;
- 3) terpenuhi dukungan personel riil satlantas yang mengisi posisi-posisi jabatan di struktur satlantas sehingga menghilangkan kekosongan pada posisi jabatan tertentu yang berdampak meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dibidang lalu lintas secara maksimal.

Dibalik keberhasilan Satlantas Polres Mempawah meningkatkan realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I tahun 2023 ini, didalam pelaksanaannya juga terdapat kendala yaitu:

- 1) kurangnya kesadaran masyarakat atau pengguna jalan tentang tertib lalu lintas.
- 2) kurangnya kesadaran masyarakat atau pengguna jalan tentang kelengkapan surat- surat atau kelengkapan kendaraan maupun SIM.
- 3) Luasnya daerah hukum Polres Mempawah serta belum didukung ruas jalan yang memadai serta ruas jalan yang bagus.
- 4) perkembangan dari kemajuan wilayah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melaksanakan aktifitas di wilayah Kabupaten Mempawah didukung adanya arus barang baik dari arah Kabupaten Mempawah ke Kota Pontianak atau Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang dan Kota madya Singkawang.

Upaya yang dilakukan ialah:

- 1) memaksimalkan peran personel lalu lintas dan fungsi samapta.
- 2) memberikan pelatihan/penyelenggaraan kepada personel di bidang penindakan maupun Strong Point dan turjawali lintas dilakukan sebelum apel pagi.
- 3) melakukan sosialisasi Kamtibcar Lantas kepada masyarakat terorganisir maupun masyarakat awam yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa.
- 4) melakukan pengaturan dan Patroli pada pagi dan sore hari di titik-titik daerah macet dan rawan laka lintas;
- 5) berkoordinasi dengan instansi terkait/DISHUB dalam perbaikan sarana dan prasarana jalan (marka dan rambu).

Tabel 14.

Data Kecelakaan lalu Lintas sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Satker Polres Mempawah

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	URAIAN KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
			MD	LB	LR	
TRIWULAN I						
1	JANUARI	5	4	1	-	7.500.000
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-
3	MARET	8	6	-	2	36.500.000
SUB JUMLAH		13	10	1	2	44.000.000
TOTAL JUMLAH		13	10	2	4	44.000.000

Sumber : Satlantas Polres Mempawah

b) Indeks Community Policing

Indeks *Community Policing* didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*). Indeks *Community Policing* mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polres dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Community Policing mencirikan:

- Pencegahan tindak criminal berbasis masyarakat/community;
- Re-orientasi pola dan aktivitas patroli;
- Peningkatan akuntabilitas public;
- Desentralisasi komando.

Indeks *Community Policing* yaitu hasil persentase (bobot) dari 4 (empat) elemen/komponen sebagai berikut:

- Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa.
- Persentase Siskamling Aktif.
- Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas.
- Persentase Lembaga yang Memiliki Polsus.

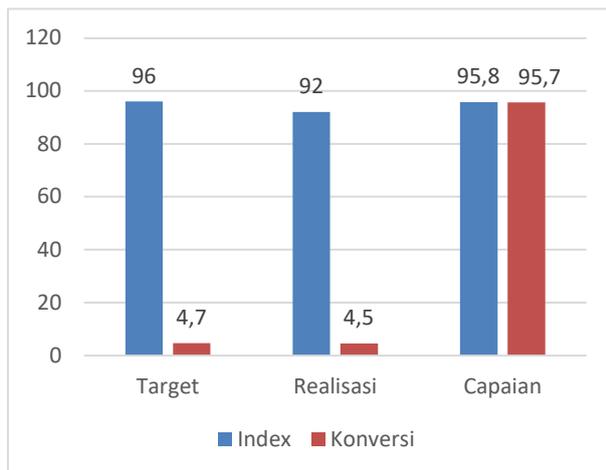
Berikut ini ditampilkan data capaian kinerja Indeks *Community Policing* Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023:

Tabel 15.

Capaian Kinerja Indeks *Community Policing* Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN		DATA		SUDAH BOBOT		CAP %
			T	R	T	R	
1	Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa	25%	82	67	21	17	81%
2	Persentase siskamling aktif	30%	100	100	30	30	100%
3	Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas	25%	100	100	25	25	100%
4	Persentase Lembaga yang memiliki Polsus	20%	100	100	20	20	100%
NILAI INDEKS					96	92	95,8%
KONVERSI					4,7	4,5	95,7%

Grafik 4.
Capaian Kinerja Indeks Community Policing Triwulan I Tahun 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada Indeks Community Policing dari indeks target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 96 terdapat realisasi sebesar 92 (95,8%) sedangkan nilai konversi setelah dibobot target sebesar 4,7 terealisasi sebesar 4,5 (95,7%). Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Satbinmas Polres Mempawah pada Indeks Community Policing sudah optimal namun belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dan masuk kategori Istimewa. Hal ini terjadi karena realisasi dari komponen target persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa dan persentase Siskamling aktif tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel data di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 16.
Data Komponen Indeks Community Policing Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TRIWULAN I		
			TAR	REAL	CAP
1	Persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa/Kelurahan (25%)	Jlh Bhabinkamtibmas (SKEP)	55	45	81,81%
		Jumlah Desa/Kelurahan	67	67	100%
	Persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa/Kelurahan		82%	67,16%	81,81%
	Persentase Bhabinkamtibmas terhadap Desa/Kelurahan (setelah bobot 25%)		20,5%	16,79%	20,4%
2	Persentase siskamling aktif (30%)	Jumlah Siskamling Aktif	17	10	58,8%
		Jumlah seluruh Siskamling	17	10	58,8%
	Persentase siskamling aktif		100%	100	100%
	Persentase siskamling aktif (setelah bobot 30%)		30%	30%	100%
3	Persentase FKPM/Pokdar Kantibmas (25%)	Jumlah FKPM/Pokdar Kantibmas yang aktif	9	9	100%
		Jumlah seluruh FKPM/Pokdar Kantibmas	9	9	100%
	Persentase FKPM/Pokdar Kantibmas		100%	100%	100%
	Persentase FKPM/Pokdar Kantibmas (setelah bobot 25%)		25	25	100%
4	Persentase Lembaga yang memiliki Polsus (20%)	Jumlah lembaga yang memiliki Polsus	3	3	100%
		Jumlah lembaga yang harus memiliki Polsus	3	3	100%

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TRIWULAN I		
			TAR	REAL	CAP
	Persentase Lembaga yang memiliki Polsus		100%	100%	100%
	Persentase Lembaga yang memiliki Polsus (setelah bobot 20%)		20%	20%	100%

Nilai Target 96, Realisasi 92, Capaian 95,8% dari Nilai persentase Indeks Community Policing Triwulan I tahun 2023 diperoleh dengan rumus:

$$ICP = \sum_{i=1}^4 w_i X_i$$

Keterangan:

ICP : Indeks *Community Policing*

X_i : Komponen ICP (*X₁* s. d. *X₄*)

w_i : Bobot masing-masing komponen (*w₁* s. d. *w₄*)

Penghitungan Nilai Target ICP

Target ICP : 21+30+25+20

Target ICP : 96

Penghitungan Nilai Realisasi ICP

Realisasi ICP : 17+30+25+20

Realisasi ICP : 92

Tabel 17.
Nilai Konversi Penilaian ICP Tahun 2023

Konversi Nilai Indikator ke Indeks	1,0 - < 2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Indeks Community Policing	< 40%	40% - < 60%	60% - < 80%	80% - < 90%	≥ 90%

Dari tabel diatas dapat diambil data penilaian Indeks Community Policing Triwulan I tahun 2023 dengan cara mengakumulasikan persentase target, realisasi, capaian ICP di Triwulan I tahun 2023 kemudian berdasarkan tabel konversi di atas penilaian yang didapatkan dari hasil penilaian ICP Triwulan I tahun 2023. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut:

- Persentase target ICP : 96
- Skor nilai konversi target ICP : 4,7 Poin
- Nilai konversi target ICP : Istimewa

- Persentase realisasi ICP : 92
Skor nilai konversi realisasi ICP : 4,5 Poin
Nilai konversi realisasi ICP : Istimewa
- Persentase capaian ICP : 95,8
Skor nilai konversi capaian ICP : 4,6 Poin
Nilai konversi capaian ICP : Istimewa

Berikut ini diuraikan capaian kinerja dari masing-masing komponen Indeks Community Policing sebagai berikut:

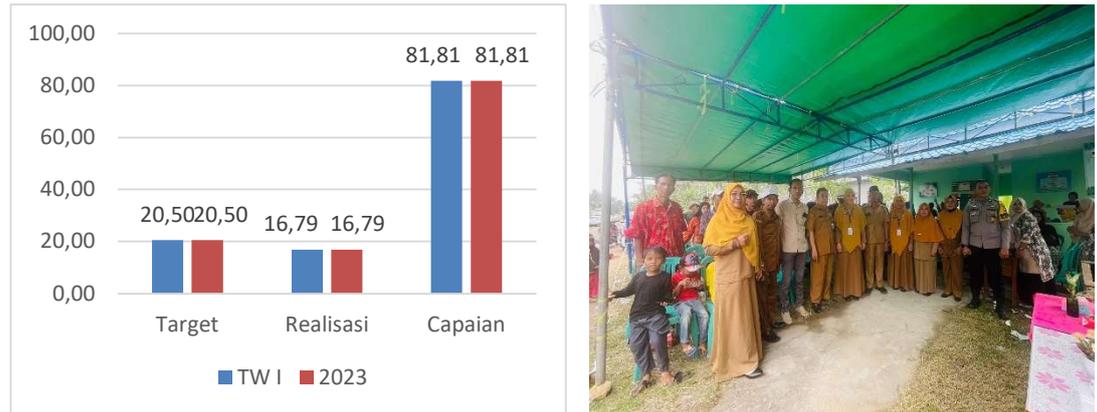
1) Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Desa

Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan Polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan Polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dalam bentuk pelayanan. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Polisi adalah hal yang sulit didapatkan karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak langsung, waktu serta kemauan yang keras dari masing-masing anggota polisi. Beranjak dari hal diatas maka Polri membuat Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Desa menjadi salah satu komponen kinerja Indeks Community Policing dan di bawah ini ditampilkan capaian kerjanya sebagai berikut:

Tabel 18.
Analisis Capaian Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Desa Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	TRIWULAN I			TAHUN 2023		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Jumlah Bhabinkamtibmas (Skep)	55	45	81,81	55	45	81,81
2	Total Desa	67	67	100	67	67	100
NILAI % BHABINKAMTIBMAS THDP DESA		82	67,16	81,81	82	67,16	81,81
NILAI SETELAH BOBOT 25%		20,5	16,79	81,81	20,5	16,79	81,81

Grafik 5.
Analisis Capaian Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Desa Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Persentase Bhabinkamtibmas Terhadap Desa pada Triwulan I Tahun 2023 dengan pembobotan 25% maka didapat target sebesar 20,5 telah terealisasi sebesar 16,79 dengan capaian kinerja sebesar 81,81%, mengingat polarisasi ini adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satbinmas Polres Mempawah pada Triwulan I Tahun 2023 masih belum optimal dengan ditandainya tidak ada penambahan anggota Bhabinkamtibmas sampai dengan triwulan I tahun 2023 ini dimana bhabinkamtibmas yang sudah mendapatkan Skep sebanyak 45 orang sedangkan target yang ditentukan sebanyak 55 personel dan jika melihat jumlah desa yang ada sebanyak 67 desa, jumlah bhabinkamtibmas dirasa kurang cukup sehingga perlu adanya peningkatan jumlah bhabinkamtibmas dengan menerbitkan Skep pada triwulan selanjutnya di tahun 2023 maupun tahun berikutnya dengan mempertimbangkan penambahan jumlah personel riil Polres Mempawah dan dukungan anggaran untuk honor dan kegiatan Bhabinkamtibas yang telah dialokasikan dalam DIPA Satker T.A. 2023 serta telah tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan Bhabinkamtibmas seperti adanya motor operasional merk Honda Verza, handphone dan lainnya.

Kendala yang dihadapi adalah apabila ada personel Bhabinkamtibmas yang pensiun dan mutasi keluar tidak segera ditunjuk personel pengganti sehingga jumlah Bhabinkamtibmas setiap tahun terjadi penurunan dan pada Tahun 2033 Polres Mempawah memiliki target Bhabinkamtibmas yang tergelar didesa/kelurahan secara proposional sebesar 55 orang.

Mengoptimalkan dukungan anggaran kegiatan Binmas yang bersentuhan dengan masyarakat dalam rangka terjalinnya hubungan

kerjasama yang baik antara Polri dan masyarakat sebagai upaya preventif untuk menekan tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satbinmas Polres Mempawah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

(a) Bidang Kebijakan

- i. Mengajukan kembali usulan penambahan bhabinkamtibmas kepada pembina fungsi Polda Kalbar sesuai jumlah desa yang ada di Kabupaten Mempawah untuk memenuhi kuota jumlah Bhabinkamtibmas di setiap Desa;
- ii. Tidak melakukan mutasi terhadap personel yang menjadi bhabinkamtibmas sehingga capaian target tidak berkurang dan akan berpengaruh terhadap capaian kinerja pada Index Community Policing;
- iii. Memberikan rekomendasi kepada fungsi pembinaan personel dalam hal ini Bag SDM agar menempatkan personel Polres Mempawah sebagai Bhabinkamtibmas di daerah hukum Polres Mempawah dalam rangka pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas.

(b) Bidang SDM yaitu:

- i. Meminta pembina fungsi binmas Polda Kalbar untuk melaksanakan kegiatan Asistensi Bhabinkamtibmas dengan tujuan untuk mengecek kekuatan personel Bhabinkamtibmas serta mengecek kelengkapan dan administrasi personel Bhabinkamtibmas di Fungsi Binmas Jajaran Polres Mempawah dalam melaksanakan tugas.
- ii. Satbinmas Polres Mempawah melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan personel Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dengan cara memberikan tutorial, petunjuk dan pedoman dalam melaksanakan tugas.
- iii. Satbinmas Polres Mempawah melaksanakan kegiatan apel besar Bhabinkamtibmas dengan tujuan untuk mengecek kekuatan jumlah personel Bhabinkamtibmas serta pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki personel Bhabinkamtibmas Polres Mempawah serta sebagai sarana untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tugas di

lapangan serta sarana untuk mendapatkan solusi dari kendala-kendala yang dialami oleh personel Bhabinkamtibmas selama melaksanakan tugas;

- iv. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Kabag SDM Polres Mempawah agar menerbitkan Sprin pengganti bagi personel Bhabinkamtibmas yang pensiun dan mutasi keluar Satker;

(c) Bidang Sarpras

- i. Satbinmas Polres Mempawah telah menyalurkan beberapa kelengkapan Sarpras kepada personel Bhabinkamtibmas Polsek jajaran untuk menunjang kegiatan Operasional berupa sepedamotor, jas hujan, rompi, toa, borgol, tongkat T, dan telepon selular (Hand Phone);
- ii. Mengajukan ke Polda Kalbar untuk memenuhi sarana prasarana penunjang seperti Ranmor dan Perahu air sehingga personel Bhabinkamtibmas dapat melayani di beberapa desa binaan khususnya desa yang harus ditempuh menggunakan sarana transportasi air.

Berikut ini ditampilkan data Bhabinkamtibmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: SKEP/56/III/2022 tanggal 11 Februari 2022 pada Polres Mempawah sebagai berikut :

Tabel 19.
Jumlah Bhabinkamtibmas terhadap Desa Polres Mempawah Tahun 2023

NO	SATUAN	JUMLAH	
		DESA	BHABINKAMTIBMAS
1	POLSEK SUNGAI KUNYIT	12	6
2	POLSEK MEMPAWAH HILIR	8	7
3	POLSEK MEMPAWAH TIMUR	8	6
4	POLSEK SUNGAI PINYUH	9	8
5	POLSEK ANJONGAN	5	3
6	POLSEK TOHO	14	7
7	POLSEK SEGEDONG	6	3
8	POLSEK JONGKAT	5	5
	JUMLAH	67	45

Sumber : Satbinmas Polres Mempawah

Tabel 20.
DAFTAR NAMA BHABINKAMTIBMAS POLRES MEMPAWAH TAHUN 2023

NO	SATUAN/PANGKAT/NAMA	DESA
1	POLSEK SUNGAI KUNYIT	6 BHABINKAMTIBMAS
1	AIPDA PEBRI HERMAWAN	DESA SUI KUNYIT HULU KEC. SUI KUNYIT DESA SUI KUNYIT DALAM KEC. SUI KUNYIT
2	AIPDA ANDI SUSILO	DESA SUNGAI DUNGUN KEC. SUI KUNYIT DESA MENDALOK KEC. SUI KUNYIT
3	AIPDA HERI APRIADI	DESA SUI LIMAU DESA SUI KUNYIT LAUT
4	AIPTU GUNAWAN	DESA SUI BUNDUNG LAUT KEC. SUI KUNYIT DESA BUKIT BATU KEC. SUI KUNYIT
5	BRIPKA ARISYAHPUTRA	DESA SEI DURI I KEC. SUI KUNYIT DESA SEI DURI II KEC. SUI KUNYIT
6	BRIPKA AGUSWANTO	DESA SEMUDUN KEC. SUI KUNYIT DESA SEMPARUNG PARIT RADEN KEC. SUI KUNYIT
2	POLSEK MEMPAWAH HILIR	7 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPKA DONNY FERDIAN, SH	KEL. TERUSAN KEC. MEMPAWAH HILIR
2	BRIPKA YOHANES	DESA KUALA SECAPAH KEC. MEMPAWAH HILIR KEL. TANJUNG KEC. MEMPAWAH HILIR
3	AIPDA DOLIT HARI MURYANTO	DESA PENIBUNG KEC. MEMPAWAH HILIR
4	AIPDA ANRI SANJAYA LEGAWA	DESA SENGKUBANG KEC. MEMPAWAH HILIR
5	BRIGPOL BUDI UTOMO	DESA PASIR KEC. MEMPAWAH HILIR
6	BRIPKA HASRUL SIREGAR, S.H	KEL. TENGAH KEC. MPW HILIR
7	BRIPTU SANDI PRIYANTO	DESA MALIKIAN KEC. MEMPAWAH HILIR
3	POLSEK MEMPAWAH TIMUR	6 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPKA ANDRE FEBRIANTO	DESA ANTIBAR KEC. MEMPAWAH TIMUR
2	AIPDA EKO WARDOYO	DESA PASIR PELAMBANG KEC. MEMPAWAH TIMUR
3	BRIPKA SARIYO	DESA SEJEGI KEC. MEMPAWAH TIMUR KEL. PULAU PEDALAMAN KEC. MEMPAWAH TIMUR
4	AIPDA SUBROTO	KEL. PASIR WAN SALIM KEC. MEMPAWAH TIMUR DESA SUNGAI BAKAU KECIL KEC. MEMPAWAH TIMUR
5	AIPDA IWAN SAPUTRA	DESA PARIT BANJAR KEC. MEMPAWAH TIMUR
6	BRIGPOL DAVID SIMANJUNTAK	DESA PASIR PANJANG KEC. MEMPAWAH TIMUR
4	POLSEK SUNGAI PINYUH	8 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPTU MUHAMMAD KURNIAWAN	DESA NUSAPATI KEC. SUI PINYUH
2	AIPDA RISKI KURNIAWAN	DESA SUI PURUN KECIL KEC. SUI PINYUH
3	AIPDA RONAL MARBUN	DESA PENIRAMAN KEC. SUI PINYUH
4	BRIPKA AHMAD DANURI	DESA SUI RASAU KEC. SUI PINYUH DESA GALANG KEC. SUI PINYUH
5	BRIPKA HASBI YUWONO	DESA SUI BAKAU BESAR DARAT KEC. SUI PINYUH
6	BRIPKA HENDRI SUMITRA	DESA SUI BATANG KEC. SUI PINYUH
7	BRIPKA EKO MUSTAFA SAPUTRA	DESA SUI BAKAU BESAR LAUT KEC. SUI PINYUH
8	BRIPKA YOHANES HERI UNTORO	KEL. SUI PINYUH KEC. SUI PINYUH
6	POLSEK ANJONGAN	3 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPKA ARY SISWANTO	DESA KEPAYANG KEC. ANJONGAN DESA DEMA KEC. ANJONGAN
2	BRIGPOL STEVEN DEFRI CHRISWARA	KEL. ANJONGAN MELANCAR KEC. ANJONGAN DESA ANJONGAN DALAM KEC. ANJONGAN
3	AIPDA DENI SATRIAWAN	DESA PAK BULU KEC. ANJONGAN
6	POLSEK TOHO	7 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPKA ANGGA PUJA NUGRAHA	DESA TERAP KEC. TOHO DESA KECURIT KEC. TOHO
2	BRIPTU I MADE PRADNYANA	DESA ANSIAP KEC. SADANIANG DESA SUAK BARANGAN KEC. SADANIANG
3	BRIPKA METRO YOSWANDI	DESA PAK LAHENG KEC. TOHO DESA TOHO ILIR KEC. TOHO

NO	SATUAN/PANGKAT/NAMA	DESA
4	BRIPKA YOAKIM HARIYADI	DESA SEMBORA KEC. TOHO DESA BENUANG KEC. TOHO
5	BRIPKA MINJA WIDIANTO	DESA SEPANG KEC. TOHO DESA PAK UTAN KEC. TOHO
6	AIPDA SURIANTO	DESA BUMBUN KEC. SADANIANG DESA AMAWANG KEC. SADANIANG
7	BRIGPOL HENDRA	DESA PENTEK KEC. SADANIANG DESA SEKABUK KEC. SADANIANG
7	POLSEK SEGEDONG	3 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPKA SUPARDI	DESA SUI BURUNG KEC. SEGEDONG DESA PENITI DALAM II KEC. SEGEDONG
2	AIPDA MARYADI WIBOWO	DESA SUI PURUN BESAR KEC. SEGEDONG DESA PENITI DALAM I KEC. SEGEDONG
3	BRIPITU DENI ANDRIADI	DESA PARIT BUGIS KEC. SEGEDONG DESA PENITI BESAR KEC. SEGEDONG
8	POLSEK JONGKAT	5 BHABINKAMTIBMAS
1	BRIPKA GATOT.WICAKSONO	DESA JUNGKAT KEC. SIANTAN
2	AIPDA PURWANTO, S.SOS	DESA WAJOK HILIR KEC. SIANTAN
3	AIPDA ALOYSIUS, SH	DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN
4	AIPDA GUNTUR HARDIASYAH, SH	DESA PENITI LUAR KEC. SIANTAN
5	BRIPKA SETO DARU INDRO	DESA SEI NIPAH KEC. SIANTAN

"Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor:SKEP/56/II/2022 tanggal 11 Februari 2022"

2) Persentase Siskamling Aktif

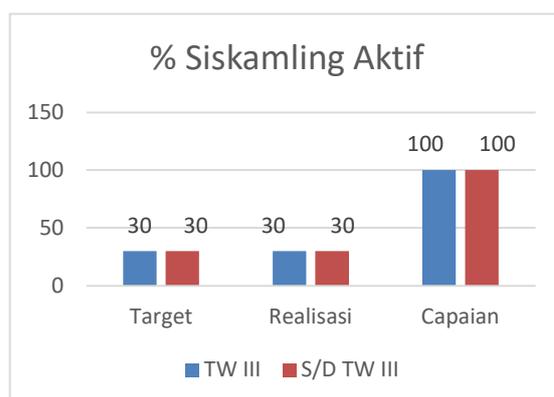
Pengaktifan Siskamling menjadi penting karena Siskamling mempunyai daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap segala bentuk gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan Siskamling yang aktif dengan seluruh Siskamling.

Tabel 21.
Analisis Capaian Persentase Siskamling Aktif Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	TRIWULAN I			TAHUN 2023		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Jumlah Siskamling Aktif	17	10	58,8	17	10	58,8
2	Jumlah Seluruh Siskamling	17	10	58,8	17	10	58,8
NILAI % PERSENTASE SISKAMLING AKTIF		100	100	100	100	100	100
NILAI SETELAH BOBOT 30%		30	30	100	30	30	100

Grafik 6.

Analisis Capaian Persentase Siskamling Aktif Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Persentase Siskamling Aktif pada Triwulan I tahun 2023 dengan pembobotan 30% didapat target sebesar 30 telah terealisasi sebesar 30 dengan capaian kinerja sebesar 100%, mengingat polarisasi ini adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satbinmas Polres Mempawah pada Triwulan I belum optimal dengan ditandainya realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dimana siskamling yang aktif sebanyak 10 siskamling dan jika melihat dari jumlah seluruh siskamling sebanyak 17 siskamling, jumlah siskamling aktif masih sangat kurang sehingga perlu adanya peningkatan jumlah siskamling aktif. Hal ini dikarenakan belum intensifnya sosialisasi dan pembinaan kepada warga oleh personel Satbinmas, dukungan sarana dan prasarana yang belum optimal serta dukungan anggaran yang tidak ada dalam rangka mengaktifkan pembinaan siskamling yang ada di wilayah hukum Polres Mempawah.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satbinmas Polres Mempawah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- (a) Mengintensifkan kembali sosialisasi, pembinaan dan pendekatan lebih sering terhadap masyarakat agar mau mengaktifkan siskamling di wilayahnya;
- (b) Melaksanakan pelatihan bagi warga dalam rangka menjaga keamanan di lingkungannya;
- (c) Mengusulkan pengalokasian dukungan anggaran pembinaan dan pelatihan siskamling kepada Pembina fungsi binmas Polda Kalbar;
- (d) Pro-aktif melalui personel Bhabinkamtibas di kewilayahan melakukan himbauan, pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan Siskamling di setiap desa/kelurahan;
- (e) Melaksanakan patroli ke Poskamling yang ada diwilayahnya guna memberikan Jukrah kepada petugas Poskamling mengenai tata cara pelaksanaan tugas Siskamling.

Berikut ini ditampilkan data Siskamling yang ada di wilayah hukum Polres Mempawah sebagai berikut :

Tabel 22.
Data Jumlah Siskamling Tahun 2023

NO	SATUAN	JUMLAH		AKTIF
		DESA	SISKAMLING	
1	POLSEK SUNGAI KUNYIT	12	1	1
2	POLSEK MEMPAWAH HILIR	8	1	1

NO	SATUAN	JUMLAH		AKTIF
		DESA	SISKAMLING	
3	POLSEK MEMPAWAH TIMUR	8	2	2
4	POLSEK SUNGAI PINYUH	9	1	1
5	POLSEK ANJONGAN	5	1	1
6	POLSEK TOHO	14	1	1
7	POLSEK SEGEDONG	6	1	1
8	POLSEK JONGKAT	5	2	2
	JUMLAH	67	10	10

Sumber : Satbinmas Polres Mempawah

3) Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas

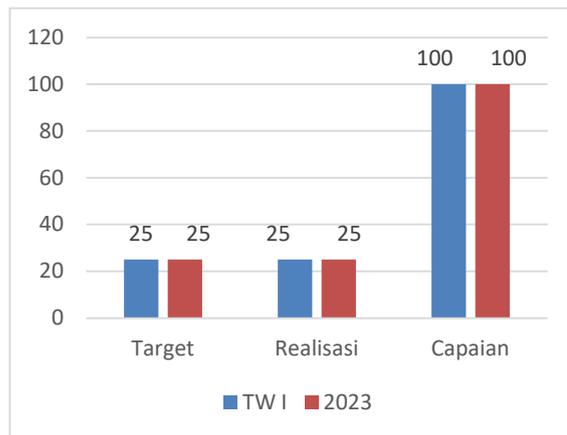
Jumlah anggota Polisi yang ada saat ini sangat tidak berimbang dengan jumlah penduduk sehingga untuk mencapai rasio ideal (1:400) akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemenuhannya sehingga untuk Harkamtibmas dibentuklah strategi yang tepat guna mengatasi kesenjangan ini yakni dengan membangun kemitraan dengan masyarakat.

Dalam proses kemitraan ini, akan dibentuk Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) sebagai sarana komunikasi mencari pemecahan masalah. Terdapat ukuran ketat terhadap FKPM, diantaranya FKPM dilarang membentuk Satgas-satgas sendiri dari warga sipil, larangan melakukan tindakan kepolisian atau mengkaitkan FKPM dengan kegiatan politik praktis. FKPM ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi akar masalah dan mencari penyelesaiannya.

Tabel 23.
Analisis Capaian Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	TRIWULAN I			TAHUN 2023		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas yang aktif	9	9	100	9	9	100
2	Jumlah seluruh FKPM/Pokdar Kamtibmas	9	9	100	9	9	100
NILAI % PERSENTASE FKPM/POKDAR KAMTIBMAS		100	100	100	100	100	100
NILAI SETELAH BOBOT 25%		25	25	100	25	25	100

Grafik 7.
Analisis Capaian Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Persentase FKPM/Pokdar Kamtibmas pada Triwulan I Tahun 2023 dengan pembobotan 25% didapat target sebesar 25 telah terealisasi sebesar 25 dengan capaian kinerja sebesar 100%, mengingat polarisasi ini adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satbinmas Polres Mempawah pada Triwulan I sudah optimal dengan ditandainya realisasi mencapai target yang telah ditentukan dimana FKPM/Pokdar Kamtibmas yang ada di Kabupaten Mempawah sebanyak 9 Pokdar dan jika melihat jumlah seluruh FKPM/Pokdar Kamtibmas sebanyak 9 Pokdar, jumlah FKPM yang ada masih cukup kurang sehingga perlu adanya peningkatan jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas sampai pada tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan optimalnya kinerja Satbinmas dalam membina FKPM/Pokdar Kamtibmas yang telah terbentuk dengan memaksimalkan personel, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang telah terdukung pada DIPA Polres Mempawah T.A. 2023.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Satbinmas Polres Mempawah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- (a) Melaksanakan pertemuan rutin dengan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka anev kegiatan FKPM/Pokdar Kamtibmas;
- (b) Membuat jukrah ke Polsek jajaran untuk ikut membentuk FKPM/Pokdar Kamtibmas di kecamatan;
- (c) Mengusulkan pengalokasian dukungan anggaran pembinaan dan pelatihan FKPM/Pokdar Kamtibmas kepada Pembina fungsi binmas Polda Kalbar;
- (d) Pro-aktif melalui personel Bhabinkamtibas di kewilayahan melakukan pembinaan dan penyuluhan kamtibmas terhadap personel

FKPM/Pokdar Kamtibmas;

Berikut ini ditampilkan data FKPM/Pokdar Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Mempawah sebagai berikut:

Tabel 24.

Data Jumlah FKPM/Pokdar Kamtibmas Tahun 2023

NO	SATUAN	FKPM/POKDAR	
		JUMLAH	AKTIF
1	POLSEK SUNGAI KUNYIT	2	2
2	POLSEK MEMPAWAH HILIR	1	1
3	POLSEK MEMPAWAH TIMUR	1	1
4	POLSEK SUNGAI PINYUH	1	1
5	POLSEK ANJONGAN	1	1
6	POLSEK TOHO	-	-
7	POLSEK SEGEDONG	1	1
8	POLSEK JONGKAT	2	2
	JUMLAH	9	9

Sumber : Satbinmas Polres Mempawah

4) Persentase Lembaga yang memiliki Polsus

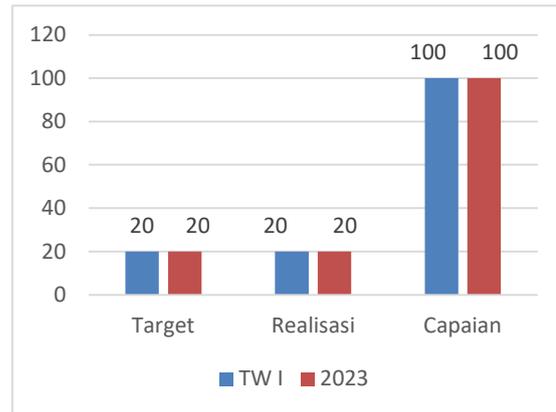
Polsus adalah instansi dan /atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang tekhnisnya masing-masing. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 25.

Analisis Capaian Persentase Lembaga yang memiliki Polsus Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	TRIWULAN I			TAHUN 2023		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Jumlah lembaga yang memiliki Polsus	3	3	100,00	3	3	40,00
2	Jumlah lembaga yang harus memiliki Polsus	3	3	100,00	3	3	100,00
NILAI % PERSENTASE LEMBAGA YANG MEMILIKI POLSUS		100	100	100,00	100	100	100,00
NILAI SETELAH BOBOT 20%		20	20	100,00	20	20	100,00

Grafik 8.
Analisis Capaian Persentase Lembaga yang memiliki Polsus Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Persentase Lembaga yang memiliki Polsus pada Triwulan I Tahun 2023 dengan pembobotan 20% didapat target sebesar 20 telah terealisasi sebesar 20 dengan capaian kinerja sebesar 100%, mengingat polarisasi ini adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Polres Mempawah pada Triwulan I Tahun 2023 sudah optimal dengan ditandainya realisasi mencapai target yang telah ditentukan dimana Lembaga yang memiliki polsus yang ada di Kabupaten Mempawah sebanyak 3 polsus sedangkan target sebesar 3 polsus. Hal ini dikarenakan optimalnya kinerja Satbinmas Polres Mempawah dalam sosialisasi terhadap Lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus dengan memaksimalkan personel, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang telah terdukung pada DIPA Polres Mempawah T.A. 2023.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Polres Mempawah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- (a) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin terhadap Lembaga-lembaga yang harus memiliki polsus di Kabupaten Mempawah;
- (b) Membuat jukrah ke Polsek jajaran untuk ikut mensosialisasikan kepada Lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus di kecamatan;
- (c) Mengusulkan pengalokasian dukungan anggaran pembinaan dan pelatihan terhadap Lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus;
- (d) Pro-aktif melalui personel Bhabinkamtibas di kewilayahan melakukan pembinaan dan penyuluhan serta pendataan terhadap Lembaga yang harus memiliki polsus;

Berikut ini ditampilkan data Lembaga-lembaga yang memiliki pomsus yang ada di wilayah hukum Polres Mempawah sebagai berikut :

Tabel 26.
Data Lembaga yang memiliki pomsus Tahun 2023

NO	LEMBAGA	JUMLAH	
		AKTIF	TDK AKTIF
1	SAT POL PP	1	-
2	RUTAN MEMPAWAH	1	-
3	DINAS PERHUBUNGAN	1	-
	JUMLAH	3	-

Sumber : Satbinmas Polres Mempawah

c) Response time kehadiran polisi di TKP

Response time atau disebut juga *Service Level Agreement (SLA)*, adalah komponen indikator kinerja untuk mengukur seberapa cepat Polres Mempawah sampai di TKP untuk menanggapi suatu kejadian yang menjadi kewenangannya. Pengukuran komponen indikator ini adalah dengan melihat seberapa banyak kejadian yang memenuhi *response time/SLA* yang telah disepakati. *Response time* dihitung dari fungsi Samapta yang menetapkan *Service Level Agreement (SLA)* response timenya yaitu 33 menit. Adapun formulasi perhitungan yang digunakan yakni:

$$RT = \frac{K}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

RT : Persentase *response time*

K : Kejadian yang memenuhi *response time*

T : Total seluruh kejadian

Setelah dirata-ratakan, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 27.
Konversi Nilai Indeks Response Time

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
<i>Response time</i> kehadiran Polres Mempawah di TKP	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %

Hasil konversi nilai ditetapkan sebagai target komponen indikator *response time* Polres Mempawah. Adapun capaian *response time* Polres Mempawah triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28.

Capaian Response Time Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	DATA TAHUN 2023					
		TRIWULAN I			2023		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Kejadian yang memenuhi response time	40	34	85	170	34	20
2	Total Seluruh Kejadian	60	50	83	250	50	20
NILAI INDEKS		66,6	68	102	68	68	100
NILAI KONVERSI		3,2	3,3	5	3,3	3,3	4,9

Grafik 9.

Capaian Response Time Triwulan I Tahun 2023



Dapat dilihat tabel dan grafik diatas pada triwulan I tahun 2023 nilai response time ditargetkan sebesar 66,6 terealisasi 68 atau (102%), hal ini menjadikan capaian response time yang dilaksanakan Polres Mempawah belum terlaksana secara optimal dimana target total kejadian yang diterima sebesar 60 kejadian dengan realisasi sebesar 50 kejadian dan mendatangi TKP tepat waktu sebesar 34 kejadian dari target sebesar 40 kejadian dengan rata-rata waktu tempuh mampu dilaksanakan selama 15 menit. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kenaikan lebih dari 100% dari target total dari seluruh laporan kejadian selama triwulan I Tahun 2023 namun personel telah mampu menerapkan SOP penanganan kejadian yang sesuai dan dukungan sarana prasarana baik kendaraan dan administrasi kegiatan serta dukungan anggaran yang cukup. Adapun jika diambil data selama tahun 2023 adalah pada realisasi response time berhasil dipenuhi sebesar 68 dari target sebesar 66,6 sehingga capaian menjadi 102%, capaian response time ini belum tercapai karena masih akan berubah mengingat masih terdapat 3 triwulan lagi untuk mendapatkan nilai capaian selama tahun 2023, Berdasarkan tabel konversi indeks Response Time realisasi saat ini berada direntang 3,0 – 4,0 yang berarti kinerja Response Time oleh Polres Mempawah sudah **Memadai** namun hal ini juga menunjukkan kinerja

Polres Mempawah belum optimal dengan dukungan personel, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja triwulan Polres Mempawah pada triwulan I Tahun 2023 belum optimal yang disebabkan beberapa kendala yaitu :

- a. Letak geografis diseluruh desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Mempawah cukup jauh dan melewati jalur perbukitan dan pegunungan;
- b. Faktor infrastruktur jalan karena sebagian polsek memiliki daerah hukum yang kondisi jalannya rusak sehingga membuat perjalanan ke TKP memerlukan waktu yang cukup lama sehingga jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain masih banyak yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4;
- c. Keterbatasan personel yang melaksanakan kegiatan mendatangi TKP;
- d. Sarana dan prasarana terutama kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dimiliki oleh Satsamapta dan Polsek jajaran Polres Mempawah belum mencukupi untuk mengakomodir kegiatan.

Dari beberapa kendala tersebut tetapi Satsamapta dan Polsek jajaran Polres Mempawah tetap mengoptimalkan kegiatan response time mendatangi TKP dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan personel, sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan response time;
- b. Segera mendatangi lokasi TKP yang dekat dan mudah ditempuh;
- c. Mengaktifkan panggilan darurat yaitu Polisi Call 110 sehingga memudahkan dalam penerimaan laporan kejadian;
- d. Membentuk Tim Patroli Reaksi Cepat pada Satsamapta;
- e. Membuat akun social media untuk mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu akun Instagram @samapta.mempawah;
- f. Peningkatan koordinasi pada setiap satuan fungsi mulai dari fungsi Reskrim, Lantas, Sabhara, SPKT dan Identifikasi serta satuan Polsek dalam melaksanakan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), pengamanan unjuk rasa dan kegiatan masyarakat;
- g. Melakukan perawatan sarana transportasi dan komunikasi secara rutin sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. Dengan menempatkan bhabinkamtibmas pada setiap desa untuk mengefektifkan waktu sehingga pelayanan kepolisian dapat dirasakan dalam waktu yang cepat yang diharapkan Bhabinkamtibmas bersama stakeholder yang ada di desa dapat bersama-sama dalam memberikan pelayanan efektif dan efisien.

Tabel 29.
Data Response Time Tahun 2023

NO	BULAN	JMLH PENGADUAN / LAPORAN YANG DITERIMA	JMLH TKP PENGADUAN /LAPORAN YANG DIDATANGI (TPTKP)	WAKTU MENDATA NGI TKP (RESPONSE TIME)	KET
1	JAN	19	12	15 MENIT	Narkotika 5kss, Curat 3kss, Judi 2kss, Kekerasan terhadap anak 2kss, Aniring 1kss, Anirat 1kss, Pengerusakan 1kss, Curanmor R2 1kss, Persetubuhan anak dibawah umur 1kss, Cyber Crime 1kss
2	FEB	14	10	15 MENIT	Curat 5 kss, Narkotika 3 kss, Cubis 2 kss, Penggelapan 2 kss, Curanmor R2 1 kss, Sajam 1 kss
3	MARET	17	12	15 MENIT	Narkotika 5 kss, penggelapan 2 kss, KDRT 2 kss, Curat 1 kss, Pencurian 4 kss, penganiayaan 1 kss, Human trafficking 2 kss.
TOTAL		50	34		

Sumber : Satsamapta Polres Mempawah

d) Tingkat Keamanan di Jalur Perairan Kabupaten Mempawah

Tingkat Keamanan di jalur Perairan adalah jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan Polres Mempawah dibagi dengan jumlah jam layar dalam 1 tahun. Patroli perairan di daerah hukum Polres Mempawah meliputi Patroli alur yaitu patroli perairan yang dilaksanakan di jalur perairan pedalaman atau perairan pesisir. Untuk mendapatkan realisasi Tingkat Keamanan Di Jalur Perairan Kabupaten Mempawah dihitung berdasarkan data kasus tindak pidana di jalur perairan yang ditangani oleh Satpolair dibandingkan dengan total durasi waktu kegiatan patroli atau jam layar (dalam jam) di jalur perairan Kabupaten Mempawah dan cara untuk menghitung jam layar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Cara perhitungan Jam Layar:

$$\begin{aligned}
 JL &= K \times J \times H \times B & 1 \text{ Kapal} \times 2 \text{ Jam} \times 5 \text{ Hari} \times 3 \text{ Bulan} &= 30 \text{ JL} \\
 & & 1 \text{ SPD} \times 5 \text{ Jam} \times 22 \text{ Hari} \times 3 \text{ Bulan} &= 330 \text{ JL} \\
 & & \text{TOTAL} &= 380 \text{ JL}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- JL* : Total durasi Jam Layar dalam satu Triwulan
K : Jumlah Sarana yang digunakan giat Patroli perairan
J : Jam layar dalam satu kali giat Patroli perairan.
H : Durasi hari giat patroli perairan.

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 30.
Konversi Nilai Indeks Tingkat Keamanan di Jalur Perairan Kabupaten Mempawah

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembinaan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Harkamtibmas lainnya. Adapun hasil capaian dari tingkat keamanan di jalur perairan kabupaten mempawah adalah sebagai berikut:

Tabel 31.
Capaian Kinerja Tingkat Keamanan di Jalur Perairan Kabupaten Mempawah Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Trgt	Real TW I		Trgt	Real TW I	%
1	Jumlah kasus tindak pidana di jalur perairan Kabupaten Mempawah	1	1		10	10	100%
2	Total durasi waktu kegiatan patroli (dalam jam) di jalur perairan Kabupaten Mempawah	1080	360				
NILAI INDEKS		0,0009	0,0027				

Grafik 10.
Capaian Tingkat Keamanan di Jalur Perairan Kabupaten Mempawah Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat keamanan di jalur perairan kabupaten mempawah beserta konversinya pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 0,0009 (10) telah terealisasi sebesar 0,0027 (10) dengan capaian kinerja sebesar 100%, mengingat polarisasi ini adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satpolair Polres Mempawah pada Triwulan I Tahun 2023 sudah optimal karena mencapai target yang ditetapkan.

e) **Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan**

Indikator kinerja ini mengukur pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengamanan obyek vital dan target rentan. Ruang lingkup pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan Obvitnas, Obvit tertentu, VIP, Obyek Pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yg bersifat nasional dan internasional. Dalam melakukan pengamanan obyek vital, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sat Samapta adalah berupa kegiatan pengamanan, penjagaan, patroli, dan pengawalan obyek vital. Adapun formulasi perhitungan dari indikator ini adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan

R : Jumlah realisasi kegiatan pengamanan

T : Jumlah target kegiatan pengamanan

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 32.
Konversi Nilai Indeks Persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan

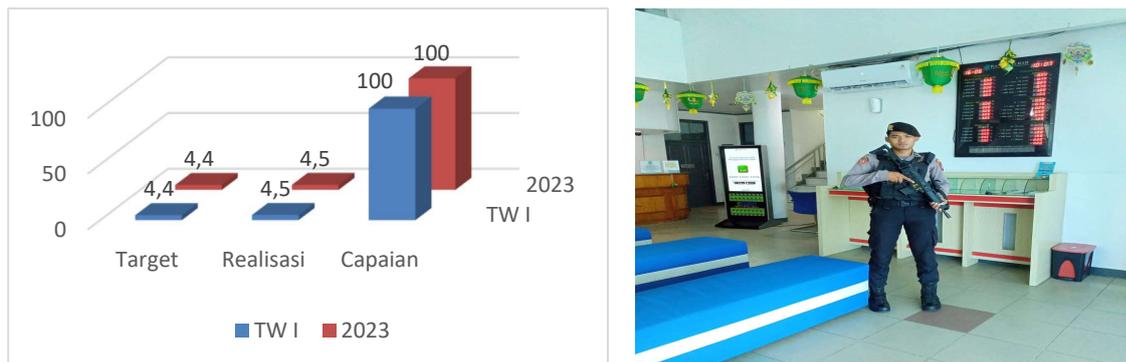
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan	< 40 %	40 % - < 60 %	60 % - < 80 %	80 % - < 90 %	≥ 90 %

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Harkamtibmas lainnya. Adapun hasil capaian dari Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan adalah sebagai berikut:

Tabel 33.
Capaian Kinerja Persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Trgt	Real TW I	%	Trgt	Real TW I	%
1	Jumlah realisasi kegiatan pengamanan	240	183	76,25	4,4	4,5	102
2	Jumlah target kegiatan pengamanan	264	198	75			
NILAI INDEKS		90,9	92,42	102			

Grafik 11.
Capaian Persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan Triwulan I Tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan beserta konversinya pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 90,9 (4,4) telah terealisasi sebesar 92,42 (4,5) dengan capaian kinerja sebesar 102%, mengingat polarisasi ini adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Unit Pamobvit Satsamapata pada Triwulan I Tahun 2023 belum optimal karena tidak mencapai target yang ditetapkan dengan jumlah target realisasi kegiatan pengamanan sebanyak 240 hari terealisasi sebanyak 183 hari dengan capaian 76,25% dan jumlah target kegiatan pengamanan sebanyak 264 hari terealisasi sebanyak hari kali dengan capaian 75%.

Namun dari beberapa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengoptimalan personel pengamanan, sarana dan prasarana yang melengkapi personel dalam pengamanan serta dukungan anggaran yang memadai. Secara umum terdapat kendala-kendala yang bisa muncul dalam pencapaian target ini yaitu :

- 1) Dinamika hari kegiatan pengamanan yang mengikuti kalender nasional sehingga terkadang jumlah riil kegiatan pengamanan tidak dapat tercapai dikarenakan terdapat beberapa hari libur nasional yang cukup banyak dalam setiap triwulannya;
- 2) Tidak ada satuan khusus berdasarkan Perpol 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres bahwa Unit Pamobvit dapat dibentuk menjadi Satpamobvit sehingga mempermudah alur hirarki dan birokrasi dalam pelaporan administrasi pengaman objek vital;

Upaya yang dilakukan ialah:

- 1) Memaksimalkan penggunaan personel Polres Mempawah dalam mendukung tercapainya target pamobvit ;
- 2) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah ada untuk melengkapi

- pelaksanaan tugas personel pamobvit;
- 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap sasaran objek vital yang memungkinkan dapat dilakukan Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan objek vital dimana saat ini Polres Mempawah hanya memiliki 3 PKS yaitu PT BPD Kalbar Cab Mempawah, PT BNI KCP Mempawah dan Bank BRI;
 - 4) Mempercepat penyaluran anggaran hasil pengamanan objek vital kepada personel yang melaksanakan pengamanan.

Tabel 34.
Data Kegiatan Unit Pamobvit Satsamapta Tahun 2023

NO	NAMA DAN JMLH OBVIT	JUMLAH HARI	KEGIATAN		
			JMLH PERS	TARGET TW I	REALISASI TW I
1	PT. BPD KALBAR	22	1	66	61
2	PT. BNI	22	1	66	61
3	PT. BNI CABANG PINYUH	22	1	66	61
TOTAL JUMLAH		66	3	198	183

Sumber : Unit Pamobvit Satsamapta

f) Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan

Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan mengukur perbandingan antara selisih perkiraan potensi gangguan (proyeksi dikurangi kejadian nyata/menonjol) dengan jumlah perkiraan potensi gangguan. Ruang lingkup dari indikator ini adalah potensi gangguan kamtibmas di bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Negara. Nilai indikator dihitung sebagai jumlah total penurunan potensi gangguan untuk seluruh bidang. Potensi gangguan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Potensi gangguan dapat dilihat dari beberapa hal, yakni Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen, Kalender Kamtibmas dan Kejadian sebelumnya. Untuk formulasi perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PPG = \frac{(\sum G_n - \sum R_n)}{\sum G_n} \times 100\%$$

Keterangan:

PPG : Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan

$\sum G_n$: Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang

$\sum R_n$: Jumlah kejadian gangguan untuk seluruh bidang

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 35.
Konversi Nilai Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan

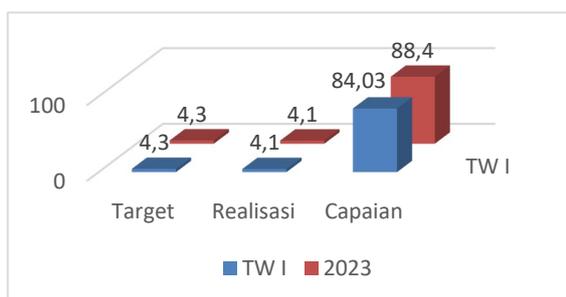
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenhahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan	< 10 %	10 % - < 30 %	30 % - < 50 %	50 % – < 80 %	≥ 80 %

Hasil konversi untuk kemudian digabung dengan nilai konversi dari komponen Indeks Harkamtibmas lainnya. Analisis dan capaian untuk Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan adalah sebagai berikut:

Tabel 36.
Capaian Kinerja Persentase kemampuan reduksi gangguan kamtibmas Triwulan I 2023

N O	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang	3260	313	9,6	4,3	4,1	95,34
2	Jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang	378	50	13,2			
NILAI INDEKS		88,40	84,03	95,45			

Grafik 12.
Capaian Kinerja Persentase kemampuan reduksi gangguan kamtibmas Triwulan I 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa setelah dikonversi bahwa tingkat persentase kemampuan reduksi gangguan kamtibmas pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 4,3 telah terealisasi sebesar 4,1 dengan capaian kinerja sebesar 95,34%, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satintelkam pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami penurunan dengan ditandainya penurunan Laporan Informasi terhadap proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang Politik, Ekonomi, Sosbud dan Kamneg dengan seiring peningkatan jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang, kinerja Satintelkam Polres Mempawah belum optimal dikarenakan persentase kemampuan reduksi gangguan kamtibmas masih berada dibawah target yang ditentukan dimana target pada tahun 2023 proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang Politik, Ekonomi, Sosbud dan Kamneg sebanyak 3.260 laporan maka sampai dengan

triwulan I tahun 2023 terealisasi sebanyak 313 laporan sedangkan peningkatan jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang dengan target sebanyak 378 laporan telah terealisasi sebanyak 50 laporan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan jumlah personil;
- 2) Personil polri tidak profesional, proporsional, kompeten dan;
- 3) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- 4) Kualitas SDM/tingkat pendidikan masyarakat masih tertinggal/rendah;
- 5) Kurangnya sinergitas antara unsur pemerintah, elemen masyarakat, ormas, LSM dengan Polri;
- 6) Budaya kearifan lokal yang tidak sejalan dengan hukum negara.
- 7) Kabupaten Mempawah dilintasi jalur antar negara;
- 8) Geografis kabupaten Mempawah yang berbukit-bukit dan sebagian besar dataran tinggi;
- 9) Pemukiman penduduk yang tidak merata;
- 10) Kegiatan atau aksi yang tidak dapat diduga seperti berbagai aksi anarkis, konflik sosial, terorisme

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi cara bertindak yang dilakukan dalam meredam potensi gangguan;
- 2) Meningkatkan pemberian imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- 3) Menjalin sinergitas antara unsur pemerintah, elemen masyarakat, ormas dan LSM dengan Polri dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif;
- 4) Meningkatkan kegiatan kepolisian seperti patroli rutin, pengamanan dan binluh Kamtibmas kepada tokoh-tokoh masyarakat, pelajar, Ormas, LSM dan khalayak masyarakat lainnya;
- 5) Mengajukan penambahan personil serta sarana prasarana ke satuan tingkat atas Polri;
- 6) Menjalin hubungan yang baik dan merangkul kepada wartawan dalam memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat serta mencegah terjadinya penyebaran berita hoax yang dapat meresahkan masyarakat;

- 7) Menggalakkan sistem pengamanan swakarsa kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Tabel 37.
Laporan Persentase kemampuan reduksi gangguan kamtibmas
Sat Intelkam Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH LAPORAN INFORMASI SEMUA BIDANG					JUMLAH GANGGUAN KAMTIBMAS SEMUA BIDANG				
		PLTK	EKO	SB	KM	JLH	PLTK	EKO	SB	KM	JLH
1	JANUARI	26	31	32	39	128	0	0	0	15	15
2	FEBRUARI	5	18	42	25	90	0	0	0	15	15
3	MARET	20	16	24	35	95	0	0	0	20	20
TOTAL JUMLAH		119	94	140	85	438	0	0	0	50	50

Sumber : Satintelkam Polres Mempawah

g) Crime rate

Crime rate adalah Jumlah kejahatan per 100.000 penduduk dalam satu tahun di daerah hukum Mempawah. Adapun formulasi perhitungan crime rate adalah sebagai berikut:

$$CRT = \frac{K \times 100.000}{P}$$

Keterangan:

CRT : Clearance Rate

K : Jumlah kejahatan dalam 1 tahun

P : Jumlah Penduduk

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 38.
Konversi Nilai Crime Rate

Komponen Indeks	Nilai Indeks				
	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Crime Rate	>40	>35 – 40	>30 -35	>25 -30	≤25

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Harkamtibmas lainnya. Adapun analisa dan capaian crime rate di daerah hukum Polres Mempawah adalah sebagai berikut:

Tabel 39.
Capaian Persentase Crime Rate sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus kejahatan di wilayah Mempawah	267	50	18,7	4,7	0,8	17
2	Jumlah penduduk di wilayah tersebut	275.325	275.325	100			
NILAI INDEKS		97	18	18,5			

Grafik 13.
Capaian Crime rate sampai dengan Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Crime Rate pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 4,7 telah terealisasi sebesar 0,8 dengan capaian kinerja sebesar 17%, dengan metode polarisasi adalah *minimize* hal ini menandakan bahwa kinerja Polres Mempawah pada Triwulan I Tahun 2023 sudah optimal dikarenakan mampu menekan realisasi dari target yang telah ditentukan dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023, realisasi laporan kasus yang diterima sebanyak 50 kasus sedangkan target laporan kasus kejahatan yang ditargetkan sebanyak 267 kasus berdasarkan data tersebut, kinerja Polres Mempawah pada triwulan I Tahun 2023 dalam upaya menekan terjadinya kasus kejahatan ini sudah cukup optimal, hal ini dikarenakan pengoptimalan penggunaan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan, pengaturan, patroli pada hari, tempat dan jam rawan di wilayah hukum Polres Mempawah telah cukup, optimalisasi dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas polri di lapangan dan dukungan anggaran yang cukup. Namun terealisasi sebanyak 44 kasus/kejadian didominasi kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang disebabkan terdapat kendala dan hambatan yang diantaranya sebagai berikut:

1) Kendala Internal

- (a) Sarana dan prasarana kurang memadai. Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.
- (b) Jaringan informasi yang terputus. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya.

2) Kendala Eksternal

- (a) Kurangnya alat bukti dan saksi. Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana.
- (b) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

Adapun upaya yang dilakukan adalah kegiatan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif:

1) Preemtif

- (a) Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan tindak kejahatan.
- (b) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa.
- (c) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas).
- (d) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan tindak kejahatan;

- (e) Melakukan penerangan dan himbaun kamtibmas kepada masyarakat melalui media-media online dan social melalui peran humas polri.
- 2) Preventif
- (a) Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek.
- (b) Melaksanakan operasi rutin.
- (c) Pendekatan dan Penyebaran Informan.
- 3) Represif
- (a) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- (b) Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku.
- (c) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Tabel 40.
Data Kasus Kejahatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN							
		K		TN		KN		BK	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1	JANUARI	14	12	5	7	0	0	0	0
2	FEBRUARI	11	9	3	4	0	0	0	0
3	MARET	12	4	5	5	0	1	0	0
TOTAL		37	25	13	16	0	1	0	0

Ket : K (Konvensional), TN (Transnasional), KN (Kekayaan Negara), BK (Berimplikasi Kontijensi)
Sumber : *Bagian Operasional Polres Mempawah*

Sasaran Strategis (SS2)

Penegakan Hukum Secara Berkeadilan

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kondisi performa kinerja penegakan hukum di Polres Mempawah. Sasaran strategis ini memberikan gambaran tentang upaya-upaya Polres Mempawah dalam peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas dan peningkatan keamanan di daerah perairan Mempawah. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan diharapkan masyarakat akan patuh dan taat pada hukum sehingga indeksKamtibmas di Kabupaten Mempawah setiap tahunnya meningkat serta masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Adapun indikator yang diukur dalam sasaran penegakan hukum secara berkeadilan adalah indeks penegakan

hukum. Selanjutnya terhadap capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU-2 Indeks Penegakan Hukum

Indeks penegakan hukum merupakan ukuran kinerja keseluruhan dari pada sasaran strategis Polres Mempawah terkait penegakan hukum. Indeks ini terdiri dari penghitungan tiga indikator yang sudah dibobotkan sebagai berikut:

Tabel 41.
Σ Komponen indeks yang sudah dibobotkan

Komponen Indeks	BOBOT
Clearance Rate Kajahatan Konvensional	22.27%
Clearance Rate Kajahatan Transnasional	19.56%
Clearance Rate Kajahatan Kekayaan Negara	21.14%
Clearance Rate Kajahatan Kontijensi	11.06%
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantasi	16.04%
Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan	11.93%

Konversi nilai dari masing-masing komponen indeks:

Tabel 42.
Konversi Nilai Komponen Indeks Gakkum

Komponen Indeks	Nilai Indeks				
	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
Clearance rate	< 25 %	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - < 75 %	≥ 75 %
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantasi	< 25 %	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - < 75 %	≥ 75 %

Seluruh nilai konversi yang diperoleh dari setiap komponen indeks, dirata-ratakan dengan formulasi perhitungan:

$$IG = 20 \times \sum_{i=1}^5 w_i X_i$$

Keterangan:

IG : Indeks Gakkum Polres Mempawah

X₁ s.d. X₅ : nilai masing-masing variable Indeks Gakkum

w₁ s.d. w₅ : bobot masing-masing variable Indeks Gakkum

Catatan : Adanya pengali berupa konstanta 20 mengingat Indeks Kamtibmas menggunakan skala 1 - 5, sedangkan Indeks Gakkum menggunakan skala 1 - 100.

Tabel 43.
Data Distribusi Skor Level Kinerja Komponen Indeks Gakkum

Distribusi Skor per Level Kinerja	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Gakkum	20 – < 40	40 – < 60	60 – < 80	80 - < 90	90 – 100

Dapat dilihat bahwa elemen dari indeks penegakan hukum adalah Clearance Rate Kajahatan Konvensional, Clearance Rate Kajahatan Transnasional, Clearance Rate Kajahatan Kekayaan Negara, Clearance Rate Kajahatan Kontijensi, dan persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas. Adapun capaian dari indeks penegakan hukum ini setelah dilakukan pembobotan pada tabel diatas sebagai berikut:

Tabel 44.
Capaian kinerja IKU Indeks Gakkum Triwulan I Tahun 2023

SS2	Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan				
IKU-2	Indeks Gakkum				
	TRIWULAN I I		TAHUN 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
23,10	23,63	102	93,99	23,63	25

Grafik 14.
Capaian kinerja IKU Indeks Gakkum Triwulan I Tahun 2023



Hasil analisa dan evaluasi capaian pada Indeks Penegakan Hukum dapat dijelaskan pada triwulan I tahun 2023 terealisasi 23,63 (102%) dari target pada triwulan I tahun 2023 sebesar 23,10, sedangkan target tahun 2023 sebesar 93,99 berhasil terealisasi sebesar 23,63 (25%). Dengan menggunakan polarisasi *Maksimize* maka kinerja Polres Mempawah pada Indeks Penegakan Hukum yang **belum tercapai maksimal** dimana realisasi capaian tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan kemudian terdapat beberapa komponen yang masih rendah

dalam mencapai realisasi sesuai target yang diinginkan yaitu pada Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara jumlah laporan 4 kasus namun penyelesaian nihil, Kontijensi laporan nihil penyelesaian nihil dan tindak pidana di jalur perairan laporan 1 kasus namun penyelesaian nihil karena dilimpahkan ke Direktorat Satpolairud Polda Kalbar. Secara rinci capaian indikator kinerja utama Indeks Gakkum pada tabel berikut ini:

Tabel 45.
Capaian kinerja IKU Indeks Gakkum Triwulan I tahun 2023

N O	Komponen	2023		Bobot	Setelah Bobot (Tahun 2023)		
		DATA			TH 2023		
		Target	Real TW I		Target	Real TW I	Cap (%)
1	Clearance Rate Kejahatan Konvensional	105	71	22,27%	1.11	0.76	68,4
KONVERSI		5	3.4				
2	Clearance Rate Kejahatan Transnasional	88	7	19,56%	0.84	0,04	4,76
KONVERSI		4.3	0.2				
3	Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara	104	0,00	21,14%	1,06	0	0
KONVERSI		5	0				
4	Clearance Rate Kejahatan Kontijensi	100	0,00	11,06%	0,54	0	0
KONVERSI		4.9	0				
5	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas	72	52	16,04%	0,56	0,38	67,8
KONVERSI		3.5	2.4				
6	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di jalur perairan	100	0	11,93%	0,58	0	0
KONVERSI		4.9	0				
INDEKS GAKKUM					93,99	23,63	
KONVERSI					4.5	1	

Dapat dilihat pada tabel diatas capaian setiap indikator dalam indeks penegakan hukum yang memiliki capaian paling rendah sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah komponen Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara sedangkan yang paling tinggi adalah Clearance Rate Kejahatan Transnasional. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Clearance Rate Kajahatan Konvensional

Clearance Rate Kejahatan Konvensional adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Konvensional di daerah hukum Polres

Mempawah berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun formula *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional adalah:

$$CRKK = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

- CRKK* : *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional
C_n : *Crime Clearance* kejahatan konvensional di tahun
T : *Crime* total kejahatan konvensional di tahun

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 46.
Konversi Nilai Clearance Rate Kejahatan Konvensional

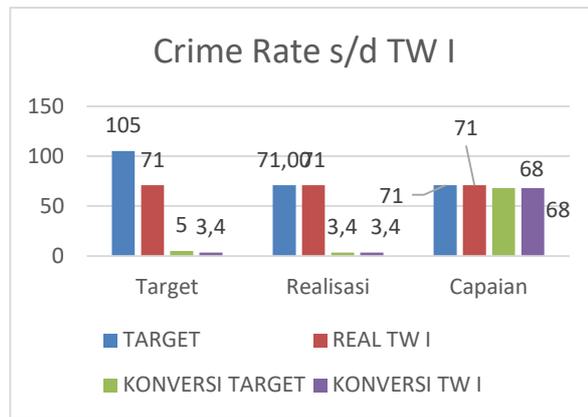
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembinaan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Konvensional	< 25%	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - <75 %	≥ 75 %

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Gakkum lainnya. Adapun capaian clearance rate pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 47.
Capaian Clearance Rate Kejahatan Konvensional Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional yang selesai ditangani oleh Polres Mempawah	144	25	17,3	5	3,4	68
2	Jumlah total kasus kejahatan konvensional yang terjadi	137	35	25,5			
NILAI INDEKS		105	71	71			

Grafik 15.
Capaian Clearance rate Kejahatan Konvensional Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Clearance Rate Kejahatan Konvensional pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 105 setelah konversi 5 telah terealisasi sebesar 71 atau 3,4 dengan capaian kinerja sebesar 71% atau 3,4 setelah koversi, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satreskrim Polres Mempawah pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami penurunan dengan ditandainya berkurangnya penyelesaian kasus kejahatan konvensional, kinerja Satreskrim Polres Mempawah belum optimal dikarenakan belum mampu menyelesaikan realisasi dari target yang telah ditentukan dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023 realisasi penyelesaian kasus kejahatan konvensional sebanyak 25 kasus dari jumlah laporan kasus kejahatan konvensional sebanyak 35 kasus masih kurang sebanyak 10 kasus. hal ini dikarenakan terdapat kendala dan hambatan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jaringan informasi yang terputus. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya;
2. Kurangnya alat bukti dan saksi. Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana;
3. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.

Upaya nyata yang dilakukan fungsi reskrim jajaran Polres Mempawah guna peningkatan kinerja fungsi reskrim dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan /kapabilitas penyidik;
- b. Mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana konvensional;
- c. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
- d. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak;
- e. Melaksanakan penindakan tindak pidana perdagangan orang dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

Tabel 48.
Data kasus kejahatan konvensional sampai dengan triwulan I Tahun 2023

NO	BULAN	SATUAN	TP. KONVESIONAL TW I	
			L	S
1	Januari	Satreskrim	10	11
		Polsek Jongkat	1	0
		Polsek Segedong	0	0
		Polsek Sungai Pinyuh	1	1
		Polsek Anjongan	0	0
		Polsek Toho	1	0
		Polsek Sungai Kuyit	1	0
SUB TOTAL			14	12
2	Februari	Satreskrim	4	4
		Polsek Jongkat	4	2
		Polsek Segedong	0	0
		Polsek Sungai Pinyuh	0	2
		Polsek Anjongan	3	0
		Polsek Toho	0	0
		Polsek Sungai Kuyit	0	0
SUB TOTAL			11	8
3	Maret	Satreskrim	8	2
		Polsek Jongkat	2	0
		Polsek Segedong	0	0
		Polsek Sungai Pinyuh	2	1
		Polsek Anjongan	0	1
		Polsek Toho	0	0
		Polsek Sungai Kuyit	0	0
SUB TOTAL			12	4
JUMLAH			35	25

Sumber: Satreskrim Polres Mempawah.

b) Clearance Rate Kejahatan Transnasional

Clearance Rate Kejahatan Transnasional adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Transnasional di daerah hukum Polres Mempawah berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan

Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun formula *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional adalah:

$$CRKK = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

CRKK : *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional

C_n : *Crime Clearance* Kejahatan Transnasional di tahun

T : *Crime* total Kejahatan Transnasional di tahun

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 49.
Konversi nilai *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional

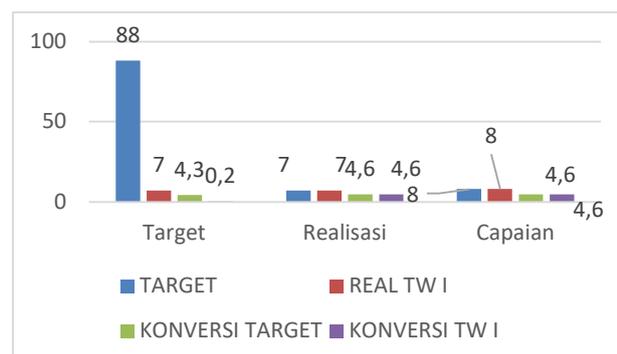
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 – 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembinaan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Transnasional	< 30%	30 % - < 55 %	55 % - < 70 %	70 % - < 80 %	≥ 80 %

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Gakkum lainnya. Adapun capaian *clearance rate* pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 50.
Capaian *Clearance Rate* Kejahatan Trans Nasional Triwulan I Tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan Transnasional yang selesai ditangani oleh Polres Mempawah	69	1	1,4	4,3	0,2	4,6
2	Jumlah total kasus kejahatan Transnasional yang terjadi	78	15	19,2			
NILAI INDEKS		88	7	8			

Grafik 16.
Capaian *Clearance rate* Kejahatan Transnasional Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Clearance Rate Kejahatan Transnasional pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target sebesar 88 setelah konversi 4,3 telah terealisasi sebesar 7 atau 0,2 dengan capaian kinerja sebesar 8% atau 4,6% setelah konversi, data diatas bersumber dari hasil penanganan kasus kejahatan transnasional oleh Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Mempawah, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Mempawah pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami penurunan dengan ditandainya berkurangnya penyelesaian kasus kejahatan transnasional, kinerja Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Mempawah belum optimal dikarenakan belum mampu menyelesaikan realisasi dari target yang telah ditentukan dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023 realisasi penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebanyak 1 kasus dari jumlah laporan kasus kejahatan transnasional sebanyak 15 kasus masih kurang sebanyak 14 kasus. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan clearance rate ini yaitu:

1. pengoptimalan penggunaan personel dalam melaksanakan tugas pengungkapan kasus kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah hukum Polres Mempawah telah cukup;
2. Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka di lapangan;
3. Dukungan anggaran yang cukup dalam rangka penyelesaian kasus kejahatan transnasional;
4. Kerjasama dan saling berkoordinasi antara personel Polri dan masyarakat sehingga dapat mendeteksi terjadinya kasus kejahatan transnasional.

Namun dalam upaya penindakan terjadinya kejahatan transnasional ini yang terealisasi sebanyak 1 kasus/kejadian didominasi kasus kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan terdapat kendala dan hambatan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jaringan informasi yang terputus. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya;
2. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya

terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

Upaya nyata yang dilakukan guna peningkatan kinerja fungsi reskrim dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah:

1. Meningkatkan kemampuan /kapabilitas penyidik;
2. Mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana konvensional;
3. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
4. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Tabel 51.
Data kejahatan Transnasional s/d triwulan I tahun 2023

NO	BULAN	KEJAHATAN TRANS NASIONAL										JUMLAH	
		NARKOTIKA		TERORISME		MONEY LAUNDRY		DAGANG MANUSIA		CYBER CRIME			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	JANUARI	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0
2	FEBRUARI	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
3	MARET	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
TOTAL KASUS		15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1

Sumber: Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Mempawah

c) Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara

Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Kekayaan Negara di daerah hukum Polres Mempawah berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun formula *Clearance Rate* Kejahatan Kekayaan Negara adalah:

$$CRKK = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

CRKK : *Clearance Rate* Kejahatan Kekayaan Negara
C_n : *Crime Clearance* Kejahatan Kekayaan Negara di tahun
T : *Crime total* Kejahatan Kekayaan Negara di tahun

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 52.
Konversi Nilai Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara

Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 - 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembenahan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa

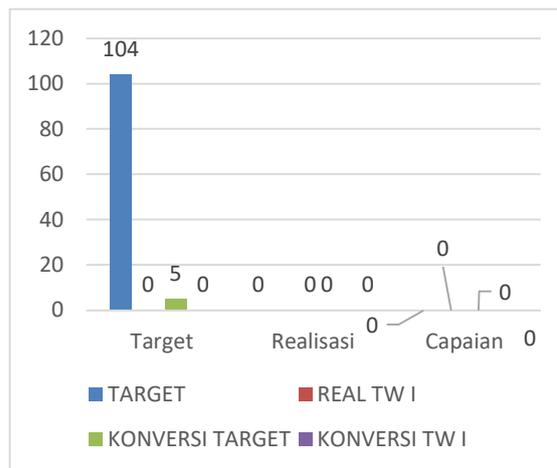
Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara	< 25%	25 % - < 50 %	50 % - < 60 %	60 % - <75 %	≥ 75 %
--	-------	---------------	---------------	--------------	--------

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Gakkum lainnya. Adapun capaian clearance rate pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 53.
Capaian Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara Triwulan I tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan Kekayaan Negara yang selesai ditangani oleh Polres Mempawah	26	0	0	5	0	0
2	Jumlah total kasus kejahatan Kekayaan Negara yang terjadi	25	4	16			
NILAI INDEKS		104	0	0			

Grafik 17.
Capaian Clearance rate Kejahatan Kekayaan Negara Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara pada Triwulan I tahun 2023 dengan target sebesar 104 setelah konversi 0 telah terealisasi sebesar 0 atau 0 dengan capaian kinerja sebesar 0%, data diatas bersumber dari hasil penanganan kasus kejahatan Kekayaan Negara oleh Satreskrim Polres Mempawah, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satreskrim Polres Mempawah pada Triwulan I mengalami penurunan atau tidak optimal dengan ditandainya tidak adanya penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara berbanding lurus dengan naiknya laporan kasus yang diterima, sedangkan apabila dihitung berdasarkan target tahun 2033 yaitu sebesar 104 (5) berhasil terealisasi sebesar 0 (0) dengan capaian sebesar 0% namun demikian

harus tetap maksimal dalam kegiatan pencegahan terhadap gangguan kamtibmas yang kemungkinan akan terjadi di daerah hukum Polres Mempawah khusus tindak pidana kekayaan negara.

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan Satreskrim Polres Mempawah masih mengalami kendala dan hambatan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jaringan informasi yang terputus. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya;
2. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi;
3. Keterbatasan personel Satreskrim dalam melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan kekayaan negara, sehingga tidak dapat mengakomodir terhadap laporan kasus yang diterima;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka melakukan penindakan kasus kejahatan kekayaan negara sehingga memperlambat proses mobilisasi ke TKP dan mengangkut barang bukti.

Upaya nyata yang dilakukan guna peningkatan kinerja fungsi reskrim dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah:

1. Meningkatkan kemampuan /kapabilitas penyidik;
2. Mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana kekayaan negara;
3. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
4. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak;
5. Mengusulkan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka penindakan kasus kejahatan kekayaan negara;

6. Mengusulkan penambahan personel kepada fungsi SDM Polres Mempawah untuk mendukung administrasi, penyidikan tindak pidana kekayaan negara;
7. Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan pembinaan fungsi tingkat Polda dalam hal ini Ditkrimsus Polda Kalbar secara intens berkaitan dengan berkas perkara atau administrasi lain yang berkaitan dengan kasus dimaksud.

Tabel 54.
Data kejahatan Kekayaan Negara s/d triwulan I tahun 2023

NO	BULAN	KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA										JUMLAH	
		KORUPSI		ILLEGAL MINING		ILLEGAL LOGGING		BBM ILLEGAL		UANG PALSU			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	JANUARI	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KASUS		3	0	0	0	-	-	1	0	-	-	4	0

Sumber: Satreskrim Polres Mempawah

d) Clearance Rate Kejahatan Kontijensi

Clearance Rate Kejahatan Kontijensi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam kategori Kejahatan Kontijensi di daerah hukum Polres Mempawah berdasarkan Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adapun formula *Clearance Rate* Kejahatan Kontijensi adalah:

$$CRKK = \frac{C_n}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

CRKK : *Clearance Rate* Kejahatan Kontijensi

C_n : *Crime Clearance* Kejahatan Kontijensi di tahun

T : *Crime* total Kejahatan Kontijensi di tahun

Hasil perhitungan di atas, selanjutnya dikonversi sesuai dengan tabel konversi di bawah ini:

Tabel 55.
Konversi Nilai Clearance Rate Kejahatan Kontijensi

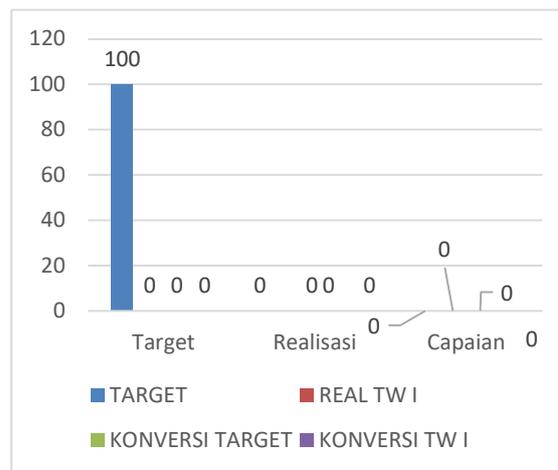
Konversi Nilai Indikator ke Indeks (skala 1 – 5)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	4,0 – 4,5	4,5 – 5,0
	Perlu Pembinaan	Perlu Perbaikan	Memadai	Baik	Istimewa
<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Kontijensi	< 30%	30 % - < 55 %	55 % - < 70 %	70 % - < 80 %	≥ 80 %

Konversi nilai yang diperoleh untuk kemudian digabung dengan konversi nilai dari komponen Indeks Gakkum lainnya. Adapun capaian clearance rate pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 56.
Capaian Clearance Rate Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Triwulan I tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus atau peristiwa kejahatan Kontinjensi yang selesai ditangani oleh Polres Mempawah	3	0	0	4,9	0	0
2	Jumlah total kasus kejahatan Kontinjensi yang terjadi	3	0	0			
NILAI INDEKS		100	0	0			

Grafik 18.
Capaian Clearance rate Kejahatan Kontijensi Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Clearance Rate Kejahatan Berimplikasi Kontijensi pada Triwulan I tahun 2023 dengan target sebesar 100 setelah konversi 4,9 telah terealisasi sebesar 0 atau 0 dengan capaian kinerja sebesar 0,00% atau 0% setelah koversi, data diatas bersumber dari hasil penanganan kasus kejahatan berimplikasi kontijensi oleh Satreskrim Polres Mempawah, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satreskrim Polres Mempawah untuk clearance rate kejahatan berimplikasi kontijensi pada Triwulan I tidak mengalami perubahan atau tetap dengan ditandainya tidak adanya penyelesaian kasus kejahatan berimplikasi kontijensi berbanding lurus dengan tidak adanya laporan kasus yang diterima, sedangkan apabila dihitung berdasarkan target tahun 2033 yaitu sebesar 100 (4,9) berhasil terealisasi sebesar 0 (0) dengan capaian sebesar 0,00% (0%) dan kembali menggunakan polarisasi *maximize* yang mengartikan selama tahun 2033, kinerja Satreskrim Polres Mempawah sudah optimal dikarenakan tidak ada menyelesaikan realisasi dari target yang telah ditentukan dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023 realisasi penyelesaian kasus kejahatan berimplikasi kontijensi sebanyak 0 kasus dari

target laporan kasus kejahatan berimplikasi kontijensi sebanyak 0 kasus seiring dengan tidak adanya realisasi jumlah kasus kejahatan berimplikasi kontijensi yang diterima sebanyak 0 kasus dari target sebanyak 0 kasus. Upaya nyata yang dilakukan guna peningkatan kinerja fungsi reskrim dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah:

1. Meningkatkan kemampuan / kapabilitas penyidik;
2. Mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana Berimplikasi Kontijensi;
3. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
4. Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan pembina fungsi tingkat Polda dalam hal ini Polda Kalbar secara intens berkaitan dengan berkas perkara atau administrasi lain yang berkaitan dengan kasus dimaksud;
5. Mengedepankan fungsi deteksi dan kegiatan preventif pada setiap kegiatan masyarakat sehingga kejadian kontijensi dapat dihindari;

Tabel 57.
Data kejahatan Berimplikasi Kontijensi s/d triwulan I tahun 2023

NO	BULAN	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI										JUMLAH		
		SARA		KONFLIK TNI-POLRI		UNRAS ANARKIS		BENTROK MASA		MAKAR		L	S	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S			
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL KASUS		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Sumber: Satreskrim Polres Mempawah

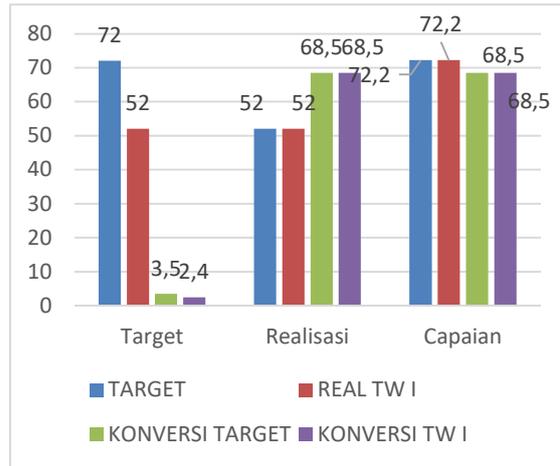
e) Persentase Selra Tindak Pidana Laka Lantas

Indikator kinerja ini penilaian didasari pada upaya-upaya yang dilakukan fungsi lantas jajaran Polres Mempawah dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi pada TAB dibandingkan dengan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada TAB. Adapun hasil capaian kinerjanya triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 58.
Capaian Persentase Selra Tindak Pidana Laka Lantas Triwulan I tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus atau peristiwa TP Laka Lantas yang diselesaikan oleh polisi	128	16	12,5	3,5	2,4	68,5
2	Jumlah total perkara tindak pidana laka lantas yang terjadi	178	31	17,4			
NILAI INDEKS		72	52	72,2			

Grafik 19.
Capaian Persentase Selra Tindak Pidana Laka Lantas Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Persentase Selra Tindak Pidana Laka Lantas pada Triwulan I tahun 2023 dengan target nilai indeks sebesar 72 setelah konversi 3,5 (*target Lp 178 selesai 128 Lp*) telah terealisasi (*jumlah LP 31 selsai 16 Lp*) capaian nilai indeks 52% dan capain konversi 2,4.

Dari hasil penanganan Tindak Pidana Laka Lantas oleh Satlantas Polres Mempawah, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan bahwa kinerja Satlantas Polres Mempawah pada Triwulan I mengalami penurunan atau tidak optimal dengan ditandainya turunnya penyelesaian kasus Tindak Pidana Laka Lantas berbanding berlawanan dengan laporan kasus yang diterima pada triwulan I tahun 2023 realisasi penyelesaian Tindak Pidana Laka Lantas sebanyak 16 kasus dari laporan Tindak Pidana Laka Lantas sebanyak 31 kasus menghasilkan nilai indeks selra sebesar 52% atau 2,4 setelah konversi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase selra ini yaitu:

1. Pengoptimalan penggunaan personel dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Mempawah telah cukup;
2. Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka di lapangan;
3. Dukungan anggaran yang cukup dalam rangka penyelesaian tindak pidana laka lantas;
4. Kerjasama dan saling berkoordinasi antara personel Polri dan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan perkara tindak pidana laka lantas yang terjad;

5. Pendekatan secara ADR / Restorate Justice terhadap tersangka dan korban;
6. Mendukung secara administratif baik tersangka dan korban yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka berat untuk kelengkapan persyaratan biaya pengobatan baik oleh jasa rahrja maupun BPJS Kesehatan.

Namun dalam upaya penindakan terjadinya kasus tindak pidana laka lantas ini yang terealisasi sebanyak 17 kasus/kejadian terdapat kendala dan hambatan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana laka lantas yang mengalami luka berat dan masih dalam perawatan dokter/sakit sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara cepat dan tepat waktu;
2. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan ataupun menghindari panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi;
3. Keterbatasan personel penyidik Satlantas sehingga belum mampu mengakomodir setiap kejadian tindak pidana laka lantas yang terjadi secara merata dan cepat.

Upaya nyata yang dilakukan guna peningkatan kinerja fungsi lantas dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah:

1. Meningkatkan kemampuan/kapabilitas penyidik;
2. Mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas;
3. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
4. Pengefektifkan personel dalam pengungkapan kasus laka lantas daerah hukum Polres Mempawah disamping pemberdayaan personel Polsek dalam menangani laka lantas lebih awal;
5. Memploting personel pada pos-pos pantau fungsi lantas pada jalur-jalur rawan dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

Tabel 59.
Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantas s/d triwulan I tahun 2023

NO	KESATUAN	JLH TP		SELRA TP LAKA LANTAS					
		L	S	LIDIK	SIDIK	THP 1	P21/THP 2	SP3	RJ/ADR
1	POLRES MEMPAWAH	31	16	1	-	-	1	0	14
TOTAL KASUS		31	16	1	-	-	1	0	14
				BELUM SELESAI			SUDAH SELESAI		

Sumber : Satlantas Polres Mempawah

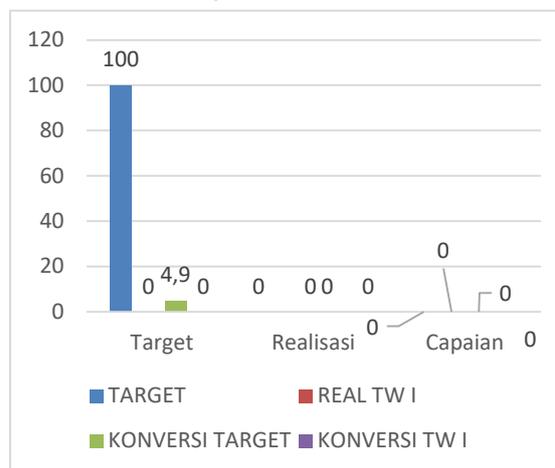
f) Persentase Selra Tindak Pidana Perairan

Indikator kinerja ini penilaian didasari pada upaya-upaya yang dilakukan fungsi Satpolair jajaran Polres Mempawah dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi pada TAB dibandingkan dengan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada TAB. Adapun hasil capaian kinerjanya triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 60.
Capaian Persentase Selra Tindak Pidana Perairan Triwulan I tahun 2023

NO	KOMPONEN	2023					
		DATA			KONVERSI		
		Target	Real TW I	%	Target	Real TW I	%
1	Jumlah kasus atau peristiwa TP perairan yang diselesaikan oleh polisi	1	0	0	4,9	0	0
2	Jumlah total perkara tindak pidana perairan yang terjadi	1	0	0			
NILAI INDEKS		100	0	0			

Grafik 20.
Capaian Persentase Selra Tindak Pidana Perairan Triwulan I tahun 2023



Dari penjelasan tabel dan grafik tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa tingkat Clearance Rate tindak pidana perairan pada Triwulan I tahun 2023 dengan target sebesar 100 setelah konversi 4,9 telah terealisasi sebesar 0 atau 0 dengan capaian kinerja sebesar 0,00% atau 0% setelah konversi, data diatas bersumber dari hasil penanganan kasus tindak pidana perairan oleh Satpolair Polres Mempawah, dengan metode polarisasi adalah *maximize* hal ini menandakan

bahwa kinerja Satpolair Polres Mempawah untuk clearance rate tindak pidana perairan pada Triwulan I tidak mengalami perubahan atau tetap dengan ditandainya tidak adanya penyelesaian kasus tindak pidana perairan berbanding lurus dengan tidak adanya laporan kasus yang diterima, sedangkan apabila dihitung berdasarkan target tahun 2023 yaitu sebesar 100 (4,9) berhasil terealisasi sebesar 0 (0) dengan capaian sebesar 0,00% (0%) dan kembali menggunakan polarisasi maximize yang mengartikan kinerja Satpolair Polres Mempawah sudah optimal dikarenakan tidak ada realisasi dari target yang telah ditentukan dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023 realisasi penyelesaian kasus tindak pidana perairan sebanyak 0 kasus dari target laporan kasus tindak pidana perairan sebanyak 1 kasus seiring dengan tidak adanya realisasi jumlah kasus tindak pidana perairan yang diterima sebanyak 0 kasus dari target sebanyak 1 kasus.

Sasaran Strategis (SS3)

Profesionalisme SDM Polres Mempawah

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kondisi performa kinerja yang ingin diwujudkan melalui peningkatan kompetensi/ kemampuan, yang tidak hanya sebatas memiliki keterampilan (skill) tetapi lebih dari itu paham secara mendetail, sehingga benar-benar menguasai dan mengerti kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Adapun indikator yang diukur dalam sasaran ini adalah Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah. Selanjutnya terhadap capaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) IKP-1 Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah

Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah merupakan ukuran kinerja keseluruhan dari pada sasaran strategis Polres Mempawah terkait Profesionalisme SDM Polres Mempawah. Indeks ini terdiri dari penghitungan tujuh komponen yang sudah dibobotkan sebagai berikut:

Tabel 80.
Komponen dan bobot Indeks Profesionalitas SDM

Komponen	Subkomponen	Bobot
Kualifikasi & Pemenuhan DSP (25)	Persentase Pendidikan pembentukan Personel Polri (sespima, sip dan pag)	12,5
	Pemenuhan DSP	12,5
Kompetensi (40)	Indeks Kompetensi Pegawai Dikjur, Pelatihan dan Assesment	40
Kinerja (30)	Nilai SMK Polri	25
	Nilai PPK Polri	5
Disiplin (5)	Tingkat pemberian reward	2,5
	Tingkat pemberian punishment	2,5

Komponen yang memiliki bobot tertinggi adalah komponen Kompetensi disusul Kinerja, Kualifikasi & Pemenuhan DSP dan Disiplin. Dari masing-masing komponen memiliki subkomponen yakni Kualifikasi & Pemenuhan DSP memiliki subkomponen Persentase Pendidikan pembentukan Personel Polri dan Pemenuhan DSP; Kompetensi memiliki subkomponen Indeks Kompetensi Pegawai Dikjur, Pelatihan dan Assesment; Kinerja memiliki subkomponen Nilai SMK Polri dan Nilai PPK Polri; Disiplin memiliki subkomponen Tingkat pemberian reward dan Tingkat pemberian punishment. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

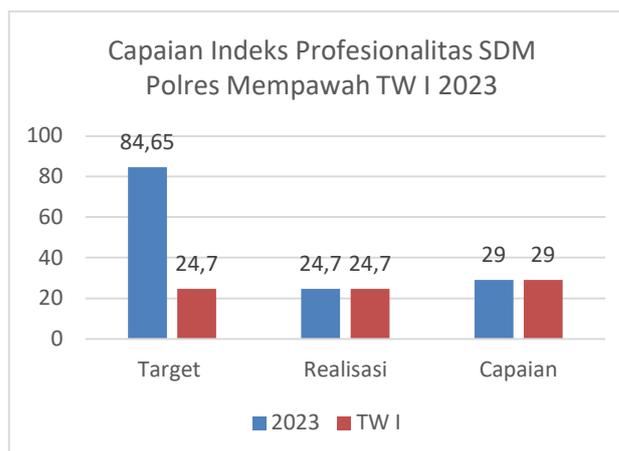
Tabel 61.
Capaian Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah per komponen Triwulan I tahun 2023

NO	KOMPONEN		TAHUN 2023		
			TARGET	REAL TW I	CAP
1	Kualifikasi & Pemenuhan DSP (25):	Persentase Pendidikan pembentukan Personel Polri (12.5) sespima, sip dan pag	22	0	
		Pemenuhan DSP (12.5)	2,75	0	0%
			46	44,8	
			5,75	5,6	97,3%
2	Kompetensi (40):	Indeks Kompetensi Pegawai Dikjur, Pelatihan dan Assesment	129	47	
			51,6	18,8	36,4%
3	Kinerja (30):	Nilai SMK Polri (25)	78	0	
			19,5	0	0%
		Nilai PPK Polri (5)	88	0	
			4,4	0	0%
4	Disiplin (5):	Tingkat pemberian reward (2,5)	26	12	
			0,65	0,3	46%
		Tingkat pemberian punishment (2,5)	1	0	0%
			0,025	0	100%
Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah			84,65	24,7	29%

Keterangan Warna

■ Bobot
■ Hasil Bobot

Grafik 21.
Capaian Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023



Dari tabel diatas dijelaskan pada triwulan I tahun 2023 didapat data bahwa:

- a. Persentase Pendidikan pembentukan Personel Polri, pada triwulan I tidak ada personil yang melaksanakan seleksi Pendidikan pengembangan baik pada tingkat bintanga maupun perwira sehingga realisasi menjadi sebesar 0 dengan capaian 0%;
- b. Jumlah DSP yang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri pada tingkat Polres dan Polsek bahwa Satker Polres Mempawah pada pemenuhan personel anggota Polri sebanyak 1.016 Personil, namun saat ini (triwulan I) Satker Polres Mempawah baru memiliki personel sebanyak 456 yang terdiri dari 444 anggota Polri dan 12 anggota PNS Polri, dengan target 46% realisasi 44,8% dan capaian 97,3%;
- c. Jumlah Indeks kompetensi pegawai (Lemdiklat), pada triwulan I tahun 2023 Polres Mempawah telah mengirimkan personel untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik di SPN Polda Kalbar maupun lemdiklat Polri yakni: pelatihan sebanyak 34 personel dan Dikjur sebanyak 8 total 13 personel, dimana Satker Polres Mempawah telah menargetkan sebanyak 129 personel pada tahun 2023, dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2023 setelah dilakukan pembobotan terealisasi 18,8 atau (36,4%) dari target 51,6;
- d. Jumlah SMK Polri Satker Polres Mempawah pada tahun 2033 telah menargetkan nilai rata – rata SMK sebesar 78% dan pada Triwulan I telah terealisasi sebesar 0% sehingga nilai capaian kinerja setelah dilakukan pembobotan 0% sedangkan nilai PPK Polri Satker Polres Mempawah pada tahun 2033 telah menargetkan nilai rata -rata sebesar 88, hingga Triwulan I telah terealisasi 0 sehingga nilai capaian PPK sebesar % dikarenakan penilaian SMK dan PPK dilakukan setiap semester;
- e. Tingkat pemberian reward dan punishment pada triwulan I tahun 2023 yaitu Satker Polres Mempawah telah menargetkan reward sebanyak 26 personil, pada Triwulan I telah terealisasi sebanyak 12 personel terdiri dari 7 personel mendapat promosi jabatan dan 5 personel mendapat penghargaan tercapai 46% dan menargetkan 1 personil punishment namun pada triwulan I 2023 tidak terdapat punishment, adapun rincian sebagai berikut:

- Personel yang mendapat reward:
 - a) IPDA IMRAN JATABAN KANIT GAKKUM POLRES MEMPAWAH atas prestasi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia personel Polri a.n. Brigpol Rio Wiranda, S.A.P. NRP 93060732, Ba Satsamapta Polres Mempawah;
 - b) BRIPKA HARYADI JATABAN P.S. PANIT I LANTAS POLSEK SUI PINYUH POLRES MEMPAWAH atas prestasi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia personel Polri a.n. Brigpol Rio Wiranda
 - c) BRIPKA DELTA WARHADI JATABAN BA SATLANTAS POLRES MEMPAWAH atas prestasi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia personel Polri a.n. Brigpol Rio Wiranda, S.A.P. NRP 93060732, Ba Satsamapta Polres Mempawah;
 - d) BRIPTU FIRDAUS JABATAN BA SATLANTAS POLRES MEMPAWAH atas prestasi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia personel Polri a.n. Brigpol Rio Wiranda, S.A.P. NRP 93060732, Ba Satsamapta Polres Mempawah;
 - e) BRIPTU NOVI KURNIAWAN JABATAN BA SATLANTAS POLRES MEMPAWAH atas prestasi pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia personel Polri a.n. Brigpol Rio Wiranda, S.A.P. NRP 93060732, Ba Satsamapta Polres Mempawah;

Keberhasilan Polres Mempawah dapat terwujud karena telah tersedianya anggaran Polres Mempawah dalam DIPA Satker Polres Mempawah T.A.2023 dalam mendukung kegiatan pembinaan SDM Polres Mempawah, realisasi pengusulan personel Polres Mempawah baik Polri maupun PNS Polri, meningkatnya kualitas personel yang mahir, terpuji dan patuh hukum sehingga kegiatan Tupoksi Polri di Polres Mempawah telah berjalan baik dan lancar sampai dengan triwulan I tahun 2023. Di samping itu dengan adanya dukungan sarana prasarana seperti gedung bangunan kantor yang *representative*, peralatan kantor dan sebagainya yang memadai serta peran pembina fungsi tingkat Polda Kalbar yang selalu aktif

memberikan petunjuk dan arahan serta rutin melakukan Moneyv atas hasil kinerja pelaksanaan SDM pada Polres Mempawah.

Dokumen Pemberian Reward Penghargaan dan PTDH Personel Triwulan I tahun 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
Nomor: Kep/ 9 /III/2023

tentang
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan personel guna meningkatkan prestasi kerja di lingkungan Polres Mempawah dan jajaran.

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 7 Tahun 2022 tentang pemberian penghargaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. rencana kerja Polres Mempawah Tahun 2023.

Memperhatikan: hasil wanjak dewan pertimbangan karier Polres Mempawah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH** memberikan Piagam penghargaan bagi personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam hal prestasi pelaksanaan tugas operasional dalam rangka Pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia personel Polri a.n. Brigpol Rio Wiranda, S.A.P. Nrp 93060732, Ba Satsamapta Polres Mempawah.

Dengan catatan:
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
1. Kapolda Kalbar.
2. Inwasda Polda Kalbar.
3. Karo SDM Polda Kalbar.
4. Kabidpropam Polda Kalbar.
5. Kasatantas Polres Mempawah.
6. Kapolsek Sungai Pinyuh.

Ditetapkan di: Mempawah
pada tanggal: 17 Maret 2023


KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
PRATIWI SUKMAWAN SYAH, S.I.K., M.H.
KORIDOR KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030875

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH
Jalan Raden Kusno Mempawah 78912

1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESMEMPAWAH
NOMOR : KEP / 9 / III / 2023
TANGGAL : 17 MARET 2023

**DAFTAR PERSONEL POLRES MEMPAWAH BERPRESTASI DALAM RANGKA
PENGUNGKAPAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG
MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA PERSONEL POLRI DI WILKUM POLRES MEMPAWAH**

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN	KET
1.	IMRAN, S.I.P.	IPDA 73040404	KANITGAKKUM SATLANTAS POLRES MEMPAWAH	PENGUNGKAPAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA PERSONEL POLRI A.N. BRIGPOL RIO WIRANDA, S.A.P. NRP 93060732, BA SATSAMAPTA POLRES MEMPAWAH
2.	DELTA WARHADI	BRIPKA 89120331	BA SATLANTAS POLRES MEMPAWAH	
3.	FIRDAUS	BRIPTU 95110098	BA SATLANTAS POLRES MEMPAWAH	
4.	NOVI KURNIAWAN	BRIPTU 97110082	BA SATLANTAS POLRES MEMPAWAH	
5.	HARYADI	BRIPKA 85010919	P.S. PANIT I LANTAS POLSEK SUI PINYUH POLRES MEMPAWAH	

Ditetapkan di: Mempawah
pada tanggal: 17 Maret 2023


KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
PRATIWI SUKMAWAN SYAH, S.I.K., M.H.
KORIDOR KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030875

Sasaran Strategis (SS4)

Modernisasi teknologi

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kondisi performa kinerja yang ingin diwujudkan melalui peningkatan teknologi di Polres Mempawah. Adapun indikator yang diukur dalam sasaran ini adalah Persentase Survey Kepuasan Penggunaan Alkom, Persentase Pemenuhan Almatsus, dan Persepsi Kemudahan Akses Data. Selanjutnya terhadap capaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

2) IKP-2 Persentase Pemenuhan Alkom Polres Mempawah

Dimasa global era digitalisasi seperti saat ini tantangan tugas yang diemban oleh Kepolisian semakin bertambah, dimana selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat Polri juga harus mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang ditengah tengah masyarakat guna sarana pendukung kegiatan personel Polri dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Kemajuan teknologi komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk perkembangan positif yang dapat dengan cepat menyampaikan pesan antara pihak pihak yang berkomunikasi sehingga Polri bertugas untuk memberikan bimbingan teknis dalam rangka Penyelenggaraan dan merealisasikan program Komunikasi dan Informasi Kepolisian untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan jaman sekarang pengawasan dan pengendalian Alkomlek agar tercapai efektifitas dan efesiensi serta produktifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Polres Mempawah menetapkan **Persentase Pemenuhan Alkom Polres Mempawah** sebagai indikator kinerja penunjang Renstra Polres Mempawah Tahun 2020-2024, Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 62.
Capaian kinerja IKU Indeks Harkamtibmas Triwulan I tahun 2023

SS4		Modernisasi Teknologi Polres Mempawah			
IKP3		Persentase Pemenuhan Alkom			
TRIWULAN I			TAHUN 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
0	0	0	69,96%	0%	0%

Grafik 22.
Capaian Survey Kepuasan Penggunaan Alkom Polres Mempawah
Triwulan I tahun 2023



Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja untuk survey kepuasan penggunaan alkom triwulan I tahun 2023 tidak menargetkan pelaksanaan survey penggunaan Alkom, target survey penggunaan Alkom dilaksanakan per semester pada tahun 2023.

3) IKP-4 Persentase Pemenuhan Almatsus

Pengukuran persentase pemenuhan Almatsus akan dilakukan dari pemformulasian berapa persentase pemenuhan Almatsus dari seluruh Satker di Polres Mempawah. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 63.
Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Almatsus
Triwulan I tahun 2023

SS4	Modernisasi Teknologi Polres Mempawah					
IKP4	Persentase Pemenuhan Almatsus					
	TRIWULAN I		TAHUN 2023			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	22,5%	1%	4,4%	90%	1%	1,1%

Grafik 23.
Capaian Persentase Pemenuhan Almatsus Polres Mempawah
Triwulan I tahun 2023



Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja untuk persentase pemenuhan Almatsus triwulan I tahun 2023 ditargetkan sebesar 22,5% dan terealisasi sebesar 1% (4,4%) serta target tahun 2023 sebesar 90% terealisasi sebesar 1% tercapai (1,1%), dihitung dari jumlah Renbut pada triwulan I 2023 sebanyak 100 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (1%). Dengan pola maximize kinerja Polres Mempawah dalam persentase pemenuhan Almatsus tidak **optimal** dikarenakan persentase pemenuhan Almatsus belum mampu terealisasi mencapai target yang ditentukan dikarenakan inventaris almatsus baru yang didapatkan oleh Polres Mempawah sampai dengan Triwulan I hanya sebanyak 1 unit dengan nilai pencatatan sebesar Rp. 41.767.224,-

Tabel 64.
Data Penerimaan Almatsus Polres Mempawah s/d Triwulan I tahun 2023

NO	BULAN	ALMATSUS	NILAI	KUANTITAS	KET
PERALATAN DAN MESIN			41.767.224	1 unit	
1	JANUARI			-	-
2	FEBRUARI			-	-
3	MARET	Sound System Portable	41.767.224	1 unit	ADA ADK

Sumber : Baglog Polres Mempawah

4) IKP-5 Persepsi Kemudahan Akses Data

Penilaian indikator persepsi kemudahan akses data didasari pada Tingkat kepuasan pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi akan diambil dari survey yang akan disebar keseluruh Satker pengguna Alkom untuk diambil suaranya sebagai bahan penilaian dari indikator.

Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penilaian persepsi kemudahan akses adalah hasil kumulatif dari hasil survey yang disebar keseluruh pengguna alkom yang menyatakan puas dengan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dengan interval sebagai berikut:

- a) Interval 0% - 20% = 1
- b) Interval 21% - 40% = 2
- c) Interval 41% - 60% = 3
- d) Interval 61% - 80% = 4
- e) Interval 81% - 100% = 5

Tabel 65.
Capaian persepsi kemudahan akses data triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TRIWULAN I			TAHUN 2023		
	TARGET	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)
(IKP-5) Persepsi Kemudahan Akses Data	0	0	0%	3	0	0%

Grafik 24.
Capaian persepsi kemudahan akses data Triwulan I tahun 2023



Dari tabel diatas dapat dianalisa dan dievaluasi capaian kinerja untuk Persepsi kemudahan akses data triwulan I tahun 2023 tidak menargetkan pelaksanaan Persepsi kemudahan akses data, target dilaksanakan per semester pada tahun 2023.

Sasaran Strategis (SS5)

Pengawasan Polres Mempawah yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kondisi performa kinerja yang ingin diwujudkan yakni pelayanan publik yang baik dan birokrasi yang bersih. Adapun indikator yang diukur dalam sasaran ini adalah nilai AKIP dan nilai reformasi birokrasi. Selanjutnya terhadap capaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) IKP-5 Nilai AKIP

Pengukuran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang disesuaikan dengan penilaian dari Permenpan & RB pada Polres Mempawah yang dinilai satu kali dalam tahun berjalan. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 66.
Capaian nilai AKIP Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TRIWULAN I			TAHUN 2023 (S/D TW I)		
	TARGET	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)
(IKP-6) Nilai AKIP	78	0	0,00	78	0	0%

Grafik 25.
Capaian nilai AKIP Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023



Dari tabel diatas dijelaskan bahwa untuk capaian nilai AKIP tahun 2023 telah tercapai pada triwulan I Tahun 2023 dikarenakan penilaian AKIP hanya dilakukan satu kali dalam setiap tahun maka pada Triwulan I tahun 2023 tidak ada realisasi dan capaian dari Nilai AKIP.

2) IKP-6 Nilai Reformasi Birokrasi

Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan penting diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang selanjutnya menjadi tonggak dimulainya era reformasi gelombang pertama. Perubahan ini dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945. Dan selanjutnya moment ini menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang mencakup 3 (tiga) aspek integral bidang struktural, instrumental dan kultural. Pada perkembangannya reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, sehingga pada tahun 2024, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara universal diyakini menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan penguatan tata kelola di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

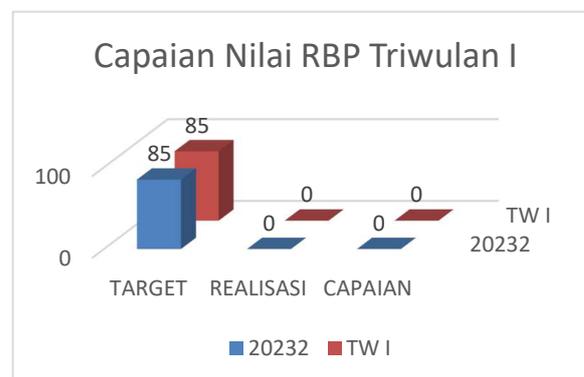
Berdasarkan kebijakan tersebut maka untuk melaksanakan penguatan tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan instrumen guna mengukur kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu Polres Mempawah menetapkan **penilaian RBP** sebagai indikator capaian kinerja pendukung yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Data penilaian RBP Polres Mempawah didapat dari website resmi "IKANMAS.NET" milik Polri yang merekam survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan polri setiap bulan. Adapun analisa capaian indikator kinerja tersebut dituangkan secara detail sebagai berikut:

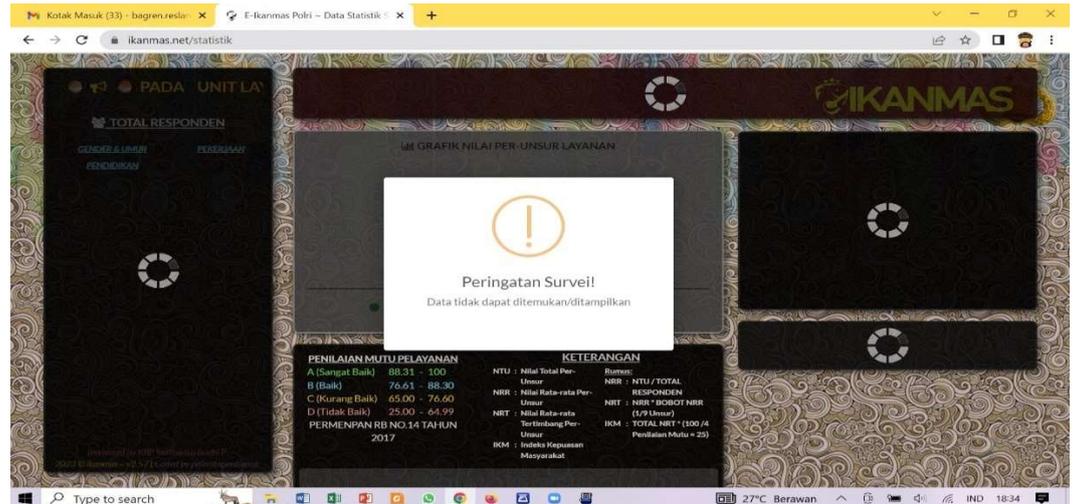
Tabel 67.
Capaian Nilai RBP Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TRIWULAN I			TAHUN 2023 (S/D TW I)		
	TARGET	REAL	CAP (%)	TARGET	REAL	CAP (%)
(IKP-7) Nilai RB	85	0	0%	85	0	0%

Grafik 26.
Capaian Nilai RBP Polres Mempawah Triwulan I tahun 2023



Dapat dijelaskan bahwa pada triwulan I tahun 2023 nilai RBP Polres Mempawah terealisasi sebesar 0 capaian 0,00% dari target 85, hal ini disebabkan karena website aplikasi www.ikanman.net mengalami eror dan nilai survey tidak ditemukan.



3) IKP-8 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pembobotan IKPA terdiri dari 13 indikator, yaitu Realisasi, Tagihan, Data Kontrak, Pengelolaan UP, Revisi DIPA, Deviasi Hal. IVI, LPJ Bendahara, 8). Renkas, SPM Salah, Retur SP2D, Pagu Minus, Dispensasi SPM, Pencapaian Output. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 68.
Capaian nilai kinerja anggaran s/d triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	S/D TRIWULAN I		
	TARGET	REAL	CAP (%)
(IKP-8) Nilai Kinerja Anggaran	99	98,67	99,6%

Data dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2023 nilai IKPA Polres Mempawah hampir melampaui target yang telah ditentukan sebesar 99 dengan realisasi sebesar 98,67 dengan capaian sebesar 99,6% hal ini disebabkan karena beberapa indikator penilaian telah terpenuhi dengan maksimal sebagaimana hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Revisi DIPA : 100;
- b) Deviasi Hal III DIPA : 74,24;
- c) Penyerapan Anggaran : 100;
- d) Belanja Kontraktual : 100;
- e) Penyelesaian Tagihan : 100;
- f) Pengelolaan UP dan TUP : 100;
- g) Dispensasi SPM : 100;
- h) Capaian Output : 100;

Nilai Indikator Kinerja Anggaran : 98,67.

Pada capaian Nilai Kinerja Anggaran yaitu nilai IKPA tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan nilai yang didapat merupakan hasil nilai sepanjang tahun dalam hal ini sampai dengan triwulan I tahun 2023, sehingga tidak ada hasil per triwulan.

Nilai IKPA Polres Mempawah s/d Maret 2023

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
						Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek							
1	042	000	045426	POLRES MEMPAWAH		100.00	86.06	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	98.67
						10	10	20	10	10	10	5	25			
						10.00	8.67	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
						93.33			100.00				100.00			

4) IKP-9 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sasaran strategis Sistem Pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani memiliki satu Indikator Kinerja Penunjang (IKP8) yaitu Persentase Penanganan pengaduan masyarakat, dengan rumusan nilai kinerja indikator tersebut sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

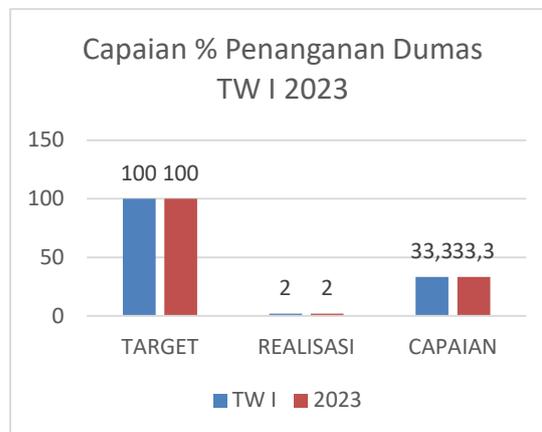
- P : Persentase Pengaduan
- R : Realisasi Pengaduan yang ditangani
- T : Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diterima

Berdasarkan hasil rumus nilai kinerja diatas maka dibawah ini dapat ditampilkan capaian kinerja indikator Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 67.
Capaian Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN I			TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 (6 Kasus)	2 Kasus	33,3%	100 (6 Kasus)	2 Kasus	33,3%

Grafik 27.
Capaian Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I tahun 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada triwulan I tahun 2023 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Polres Mempawah terealisasi sebesar 2 kasus capaian 33,3% dari target 100, sedangkan untuk Tahun 2023 ditarget sebesar 100 (6 kasus) dengan realisasi sebesar 2 capaian 33,3%, dengan pola maximize kinerja Polres Mempawah dalam Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat telah **belum optimal** ditandai dengan realisasi capaian yang tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap Polri khususnya Polres Mempawah baik Personel maupun instansi Polri sendiri namun hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa pelaksanaan tupoksi Polri di Polres Mempawah telah berjalan sesuai Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menerapkan cara bertindak yang sesuai SOP yang telah ditetapkan sejalan dengan petunjuk dan arahan pimpinan Polri. Hal ini tidak terlepas dari profesionalisme personel Polri yang bekerja sesuai ketentuan / SOP terhadap pelayanan terhadap masyarakat dan melayani dengan hati,

dukungan sarana dan prasarana berupa Gedung pelayanan pengaduan masyarakat dan peralatan yang memadai dalam rangka meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat serta telah didukungnya kegiatan ini dengan anggaran kegiatan penanganan pengaduan masyarakat Polres Mempawah.

Tabel 68.
Penanganan Pengaduan Masyarakat
sampai dengan triwulan I Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH ADUAN/ PELANGGARAN	A. PELAPOR B. TERLAPOR	SUBSTANSI ADUAN	PENYELESIAN
1	JANUARI	0	-	-	
2	FEBRUARI	0	-	-	
3	MARET	2	TERLAPOR (BRIGPOL HERRY SAPUTRA DAN AIPDA M. SAMANI	BRIGPOL HERY SYAPUTRA (PUNGUTAN LIAR), AIPDA M. SAMANI (TES URINE POSITIF MENGGUNAKAN NARKOBA DAN TIDAK MASUK KANTOR 55 HARI BERTURUT-TURUT)	BRIGPOL HERY SYAPUTRA, SP3 DAN AIPDA M. SAMANI, SP3
JUMLAH		0			

Sumber : Siwas Polres Mempawah

4) IKP-9 Persentase Penyelesaian Masalah Hukum

Indikator ini didasari masalah-masalah hukum yang merujuk pada pelanggaran - pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polres Mempawah baik kategori berat maupun ringan. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 69.
Capaian Persentase Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri
Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN I I			TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Masalah Hukum terhadap Polri	100	0	0,00%	100	0	0,00%

Grafik 28.
Capaian Persentase Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri
Triwulan I tahun 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada triwulan I tahun 2023 Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Polres Mempawah terealisasi sebesar 0 capaian 0,00% dari target 100, sedangkan untuk Tahun 2033 ditarget sebesar 100 juga realisasi sebesar 0 capaian 0,00%, dengan pola maximize kinerja Polres Mempawah dalam Persentase Penyelesaian Masalah Hukum terhadap Polri **sudah optimal** ditandai dengan tidak realisasi capaian yang memenuhi target dikarenakan tidak adanya laporan masalah hukum terhadap Polri baik Personel maupun instansi Polri sendiri namun hal ini merupakan indikasi yang baik bahwa pelaksanaan tupoksi Polri di Polres Mempawah telah berjalan sesuai Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menerapkan cara bertindak yang sesuai SOP yang telah ditetapkan sejalan dengan petunjuk dan arahan pimpinan Polri.

Tabel 70.
Penanganan Penyelesaian Masalah Hukum terhadap Polri
sampai dengan triwulan I Tahun 2033

NO	BULAN	JUMLAH ADUAN	A. PELAPOR B. TERLAPOR	SUBSTANSI ADUAN	PENYELESIAN
1	JANUARI	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	NIHIL	-
3	MARET	-	-		-
JUMLAH		0			

Sumber : Sikum Polres Mempawah

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu gambaran pencapaian kinerja di jajaran Polres Mempawah sebagai wujud nyata dalam menyampaikan pertanggungjawaban terhadap anggaran berbasis kinerja dilingkungan Polres Mempawah yang transparan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini diuraikan Realisasi Anggaran Polres Mempawah Triwulan I T.A 2023 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 71.
Capaian Realisasi Anggaran Polres Mempawah
sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU	S/D TRIWULAN I			
			REALISASI	%	SISA	%
1	LIDIK SIDIK	3.467.786.000	800.261.500	23,1	2.667.524.500	77
2	SARPRAS	3.217.690.000	821.621.784	25,5	2.398.068.216	75
3	HARKAMTIBMAS	8.339.363.000	1.792.960.600	21,5	6.493.401.400	77,72
4	DUKJEMEN	37.220.021.000	7.423.419.440	22,60	25.416.326.560	78
JUMLAH		52.244.860.000	11.286.592.366	21,6	40.907.266.634	78

Sumber : aplikasi Om SPAN Kemenkeu

Tabel 72.
Rencana Penarikan Dana (RPD) sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU	RPD TW I 20223				
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH	%
1	LIDIK SIDIK	3.467.786.000	322.960.000	239.629.467	248.794.800	811.384.267	23
2	SARPRAS	3.217.690.000	95.481.860	173.692.000	570.082.250	839.256.110	26
3	HARKAMTIBMAS	8.339.363.000	468.431.000	515.219.100	598.809.500	1.582.459.600	19
4	DUKJEMEN	37.220.021.000	2.587.759.156	2.551.295.789	2.618.109.201	7.757.164.146	21
JUMLAH		52.244.860.000	3.474.632.016	3.479.836.356	4.035.795.751	10.990.264.123	21

Sumber : Halaman III Dipa Polres Mempawah T.A. 2023

Dari Tabel tersebut diatas dapat dianalisa dan evaluasi bahwa Penyerapan anggaran Polres Mempawah sampai dengan Triwulan I T.A. 2023 dengan pagu sebesar Rp. 52.244.860.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.286.592.366,- atau sebesar 21,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 40.907.266.634,- atau sebesar 78%, Berikut dijelaskan secara rinci capaian per masing-masing program anggaran sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan pagu sebesar Rp 3.467.786.000,- sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 800.261.500,- atau sebesar 23,1% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.667.524.500,- atau sebesar 77%, berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sampai dengan bulan Maret 2023 target realisasi sebesar 23% dengan selisih sebesar +0,1% dapat diartikan bahwa penyerapan pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berhasil mencapai target RPD, Secara umum hal ini dikarenakan pelaksana anggaran mematuhi rencana penarikan dana yang telah dibuat dan tepat waktu dalam pengusulan anggaran ke Sikeu Polres Mempawah terutama untuk kegiatan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Penindakan Tindak Pidana Narkoba berhasil merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan, berikut dijelaskan rincian penyerapan per masing-masing kegiatan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 73.
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Program Lidik Sidik
sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	S/D TRIWULAN I			
			REALISASI	%	SISA	%
1	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	7.600.000	7.600.000	100%	0	0,0%
2	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	4.000.000	2.220.000	55%	1.800.000	45%
3	Penindakan Tindak Pidana Umum	2.253.514.000	599.342.500	26,6%	1.654.171.500	73,4%
4	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	695.520.000	128.856.000	18,5%	566.664.000	81,5%
5	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	410.516.000	44.750.000	10,9%	365.766.000	89,1%
6	Penindakan Tindak Pidana Perairan	10.620.000	0	0,0%	10.620.000	100%
7	Penindakan Tindak Lalu Lintas	69.016.000	12.813.000	18,6%	56.203.000	81,4%
8	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	17.000.000	4.700.000	27,6%	12.300.000	72,4%
JUMLAH		3.467.786.000	800.261.500	23,1%	2.667.524.500	77%

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yang paling tinggi penyerapannya adalah Kegiatan Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Penindakan Tindak Lalu Lintas dengan penyerapan 100% sedangkan yang paling rendah penyerapannya adalah kegiatan Penindakan Tindak Pidana Narkoba dengan penyerapan 18,5%. Tingginya penyerapan Kegiatan Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Penindakan Tindak Lalu Lintas hal ini disebabkan

tingginya pengungkapan kasus tindak pidana di daerah hukum Polres Mempawah, sedangkan pada kegiatan Penindakan Tindak Pidana Narkoba masih dalam penyelidikan, sehingga berdampak rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan ini.

- b. Alokasi anggaran program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri dengan pagu sebesar Rp 3.217.690.000,- sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 821.621.784,- atau sebesar 25,5% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.398.068.216,- atau sebesar 75%, berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sampai dengan bulan Maret 2023 seharusnya target realisasi sebesar 26% dengan selisih sebesar 1% yang mengartikan bahwa penyerapan pada Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri tidak berhasil mencapai target RPD, Secara umum hal ini dikarenakan pelaksana anggaran tidak mematuhi rencana penarikan dana yang telah dibuat dan belum melaksanakan lelang pradipa berikut dijelaskan rincian penyerapan per masing-masing kegiatan program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sebagai berikut:

Tabel 74.
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	S/D TRIWULAN I I			
			REALISASI	%	SISA	%
1	Pengembangan Peralatan Polri	20.000.000	0	0%	20.000.000,-	100%
2	Dukungan Manajemen Sarpras	3.197.960.000	821.621.784	25,5%	2.378.068.216	75%
JUMLAH		3.217.690.000	821.621.784	25,5%	2.398.068.216	75%

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yang paling tinggi penyerapannya adalah Kegiatan Dukungan Manajemen Sarpras dengan penyerapan 25,5% sedangkan yang paling rendah penyerapannya adalah kegiatan Pengembangan Peralatan Polri. Tingginya penyerapan Kegiatan Dukungan Manajemen Sarpras hal ini disebabkan tingginya penyerapan anggaran pada detil kegiatan seperti pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas baik roda 6, roda 4 maupun roda 2 serta realisasi penyerapan anggaran BMP Polres Mempawah kontraktual secara termin per triwulan sepanjang tahun, sedangkan pada kegiatan Pengembangan Peralatan Polri merupakan kegiatan belanja modal pengadaan komputer dan printer Bagren sampai dengan saat ini masih proses penyusunan HPS yang selanjutnya

akan dilaksanakan lelang Tender secara terbuka sehingga penyerapannya masih rendah sampai dengan triwulan I 2023.

- c. Alokasi anggaran program Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan pagu sebesar Rp 8.339.363.000,- sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 1.792.960.600,- atau sebesar 21,5% dengan sisa anggaran sebesar Rp 6.493.401.400,- atau sebesar 77,72%, berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sampai dengan bulan Maret 2023 target realisasi sebesar 19% dengan selisih sebesar +2,5% dapat dijelaskan bahwa penyerapan pada Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berhasil mencapai target RPD dengan selisih penyerapan (deviasi kurang/lebih) masih dibawah target yang telah ditentukan oleh Kemenkeu RI yakni 5%, berikut dijelaskan rincian penyerapan per masing-masing kegiatan program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 75.
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	S/D TRIWULAN I I			
			REALISASI	%	SISA	%
1	Analisis Keamanan	221.607.000	55.404.000	25%	166.203.000	77,9%
2	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	195.299.000	54.026.000	28%	141.273.000	72,3%
3	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	225.355.000	40.267.000	18%	185.088.000	82%
4	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	232.743.000	99.935.000	43%	132.808.000	57,1%
5	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	305.387.000	45.773.000	15%	259.614.000	85%
6	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.143.156.000	712.572.600	23%	2.377.582.400	75,6%
7	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	303.624.000	85.399.000	28%	218.225.000	71,9%
8	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	133.440.000	33.360.000	25%	100.080.000	75%
9	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	547.525.000	96.408.000	18%	451.117.000	82,4%
10	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	15.000.000	4.249.000	28%	10.751.000	71,7%
11	Pembinaan Potensi Keamanan	1.899.142.000	565.567.000	30%	1.333.575.000	70,2%
12	Pembinaan Operasi Kepolisian	1.002.385.000	0	0,00%	1.002.385.000	100,00%
13	Pengendalian Operasi Kepolisian	114.700.000	0	0,00%	114.700.000	100,00%
JUMLAH		8.339.363.000	1.792.960.600	21,5%	6.493.401.400	77,72%

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yang paling tinggi penyerapannya adalah Kegiatan Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya dengan penyerapan 43% sedangkan yang paling rendah penyerapannya adalah kegiatan Pembinaan Operasi Kepolisian dan Pengendalian Operasi Kepolisian sebesar 0%, Tingginya penyerapan Kegiatan Analisis Keamanan Intelijen hal ini disebabkan kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana yang telah tersusun sehingga komitmen penyerapan anggaran terjaga sampai triwulan I tahun 2023, sedangkan pada kegiatan Pembinaan Operasi Kepolisian (tahapan pemilu 2024) dan Pengendalian Operasi Kepolisian terdapat pelaksanaan kegiatan anggaran yang belum bisa dilakukan penyerapan yaitu Operasi Lilin Kapuas 2023 dimana rencana penarikan dana dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

- d. Alokasi anggaran program Program Program Dukungan Manajemen dengan pagu sebesar Rp 37.220.021.000,- sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 7.423.419.440,- atau sebesar 22,60% dengan sisa anggaran sebesar Rp 25.416.326.560,- atau sebesar 78%, berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Program Dukungan Manajemen sampai dengan bulan Maret 2023 target realisasi sebesar 21% dengan selisih sebesar +0,6% yang mengartikan bahwa penyerapan pada Program Dukungan Manajemen berhasil melebihi target RPD dengan selisih penyerapan (deviasi kurang/lebih) masih dibawah target yang telah ditentukan oleh Kemenkeu RI yakni 5%, berikut dijelaskan rincian penyerapan per masing-masing kegiatan Program Dukungan Manajemen sebagai berikut:

Tabel 76.
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Program Dukungan Manajemen
sampai dengan Triwulan I tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	S/D TRIWULAN I I			
			REALISASI	%	SISA	%
1	Penerangan Masyarakat	84.390.000	21.799.000	26%	62.591.000	74%
2	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	36.934.018.000	7.816.602.482	21%	29.117.415.518	79%
3	Pertanggungjawaban Profesi	27.109.000	4.600.000	17%	22.509.000	83%
4	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	29.000.000	6.065.000	21%	22.935.000	79%
5	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	24.722.000	1.200.000	5%	23.522.000	95%
6	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	39.496.000	10.500.000	27%	28.996.000	73%
7	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	15.000.000	0	0,00%	15.000.000	100,00%

NO	KEGIATAN	PAGU	S/D TRIWULAN I I			
			REALISASI	%	SISA	%
8	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	15.000.000	4.485.000	30%	10.515.000	70%
9	Reformasi Birokrasi Polri	42.899.000	0	0%	42.899.000	100%
10	Manajemen Anggaran	7.387.000	5.997.000	81%	1.390.000	19%
11	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1.000.000	0	0,00%	1.000.000	100,00%
JUMLAH		37.220.021.000	7.423.419.440	22,60	25.416.326.560	78

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan program Program Dukungan Manajemen sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yang paling tinggi penyerapannya adalah Kegiatan Manajemen Anggaran dengan penyerapan 781% sedangkan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum ada penyerapan sampai dengan Maret 2023 yaitu kegiatan Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum, Reformasi Birokrasi Polri dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tingginya penyerapan Kegiatan Manajemen Anggaran hal ini disebabkan kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana yang telah tersusun sehingga komitmen penyerapan anggaran terjaga sampai triwulan I tahun 2023, sedangkan pada kegiatan Pertanggungjawaban Profesi, Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dapat dilaksanakan penyerapan dikarenakan tidak ada pelanggaran kode etik Polri di lingkungan Polres Mempawah dan penanganan kasus masalah hukum terhadap Polres Mempawah baik terhadap personel maupun institusi Polri.

Secara keseluruhan hal tersebut diatas berpengaruh pada Angka Realisasi penyerapan anggaran pada Polres Mempawah sampai dengan triwulan I sudah optimal dimana realisasi penyerapan anggaran mampu melebihi realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh pada nilai IKPA satker. Upaya yang telah dilakukan Polres Mempawah dalam percepatan realisasi anggaran diantaranya selain dengan melakukan anev secara berkala juga petunjuk dan arahan kepada Subsatker dan Polsek yang memiliki realisasi rendah tentang langkah-langkah penyelesaian, yang berisikan:

- a. Pada setiap awal tahun anggaran Kasatker selaku KPA menetapkan pejabat pengelola keuangan satker (PPK, PPSPM dan bensatker) dan menyampaikan kepada KPPN sebagai dasar pencairan DIPA, dalam hal tidak ada penggantian pejabat dimaksud cukup menyampaikan surat pemberitahuan;
- b. Melaksanakan sosialisialisasi DIPA sampai ke unit dan menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana (RPD) secara akurat dan realistis sesuai

- kondisi terkini berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada KPPN dalam rangka mengatasi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran dan antrian layanan yang panjang di KPPN yang dalam pelaksanaan berpedoman pada Permenkeu No. 277/PMK.05/2014;
- c. Melakukan pembayaran terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan melalui UP/TUP dan segera melakukan revolving up jika penggunaannya minimal telah mencapai 50%, sedangkan yang melalui pembayaran langsung (LS) selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ditanda tangani berita acara pemeriksaan penyelesaian pekerjaan (BAPP), berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) dan berita acara pembayaran (BAP) disampaikan kepada KPPN yang dalam pelaksanaan berpedoman pada Permenkeu No. 190/PMK.05/2012;
 - d. Menyampaikan data perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani kepada KPPN selambat-lambatnya 5 hari kerja untuk dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak KPPN dan didaftarkan pada aplikasi SPAN yang berkaitan dengan pencairan DIPA;
 - e. Memastikan data supplier/rekanan yang didaftarkan ke KPPN telah benar dengan mengacu pada data yang telah dilakukan pembayaran sebelumnya untuk menghindari penolakan pembayaran oleh KPPN;
 - f. Pejabat pengelola keuangan agar melaksanakan anev daya serap anggaran DIPA Polres Mempawah untuk belanja barang sekurang-kurangnya setiap bulan;
 - g. Kasikeu melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan dan selalu kordinasi dengan Bidkeu dan KPPN jika mengalami kendala dalam pencairan DIPA Polres Mempawah;
 - h. Dalam hal diperlukan revisi DIPA, segera ajukan revisi dengan berpedoman pada peraturan Menkeu tentang tata cara revisi DIPA;
 - i. Menjadikan Siwas sebagai mitra dalam proses pelaksanaan DIPA Polres Mempawah dan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.
 - j. Penyusunan administrasi Perwabkeu dalam pelaksanaan DIPA Polres Mempawah agar mempedomani Perkap No. 22 Tahun 2011 dan Perkap No. 4 Tahun 2014.
 - k. Mengevaluasi penyerapan anggaran Polres Mempawah dan jajaran serta melakukan penyesuaian / revisi dokumen anggaran sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dilapangan;

- l. Menyusun rencana penyerapan anggaran sesuai jadwal kegiatan yang dirinci setiap bulan sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencapaian target kinerja satker;
- m. mempercepat pencapaian target kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja serta optimalisasi anggaran yang terbatas;
- n. mempedomani jadwal kegiatan dan rencana penyerapan anggaran dalam pelaksanaannya;
- o. Mempercepat proses pengajuan pembayaran termin ke KPPN agar dapat segera disalurkan pada pihak Penyedia Jasa dan segera melaksanakan percepatan proses pembangunan sehingga angka realisasi anggaran khususnya belanja modal dapat mencapai target yang telah ditentukan dan membantu percepatan kemajuan perkembangan fisik bangunan sehingga pekerjaan konstruksi dapat selesai tepat pada waktunya.

BAB IV

I. PENUTUP

Kegiatan kinerja Polres Mempawah triwulan I T.A. 2023 telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat indikator kinerja yang perlu untuk ditingkatkan dan belum memenuhi target. Pencapaian target melalui realisasi dari Indikator Kinerja Utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan capaian kinerja pada Rencana Kerja T.A. 2023 dari 5 (lima) sasaran strategis secara keseluruhan realisasi kinerja dari 11 (sebelas) indikator dapat dicapai sesuai dengan target, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Impact “keamanan dan ketertiban Kabupaten,” dengan satu indikator kinerja indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten dengan target 4,3 diperoleh realisasi sebesar 1,9 dengan capaian kinerja sebesar 44%. Target indikator kinerja utama ini belum tercapai optimal, masing-masing dengan nilai capaian komponen sasaran impact adalah ***indeks harkamtibmas 60,97 dan indeks gakkum 23,63***.
 - b. Sasaran strategis pertama “pemeliharaan keamanan dan ketertiban,” dengan satu indikator kinerja utama indeks harkamtibmas diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 60,97 (66,46%). Target indikator kinerja utama ini belum tercapai optimal, masing-masing dengan nilai capaian komponen indeks ; ***persentase road safety index dengan capaian 7,14%; indeks community policing dengan capaian 95,7%; persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan dengan capaian 53,3%; presentase kemampuan reduksi potensi gangguan dengan capaian 95,3% dan crime rate dengan capaian 17,02%***.
 - c. Sasaran strategis kedua “penegakan hukum secara berkeadilan” dengan satu indikator kinerja utama indeks penegakan hukum diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 23,63 (25,14%). Target sasaran strategis ini belum tercapai optimal, masing-masing dengan nilai capaian aspek; ***Clearance rate kejahatan konvensional dengan capaian 68%; Clearance rate kejahatan transnasional dengan capaian 4,6%; Clearance rate kejahatan kekayaan negara dengan capaian 0%; Clearance rate kejahatan kontijensi dengan capaian 0%; Persentase selra tindak pidana laka lantas dengan capaian 68,5%; Persentase selra tindak pidana di jalur perairan dengan capaian 0%***;

- d. Sasaran strategis ketiga “profesionalisme SDM Polres Mempawah,” dengan tiga indikator kinerja pendukung indeks profesionalitas SDM Polres Mempawah diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 24,7 (29,17%). Target sasaran strategis ini belum tercapai optimal.
 - e. Sasaran strategis keempat “modernisasi teknologi” dengan tiga indikator kinerja utama diperoleh hasil capaian kinerja ini belum tercapai optimal, masing-masing dengan nilai capaian aspek; **Persentase Pemenuhan Alkom dengan capaian 0%; Persentase Pemenuhan Almatsus dengan capaian 1%; dan Persepsi Kemudahan Akses Data dengan capaian 0%;**
 - f. Sasaran strategis kelima “pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani,” diperoleh hasil capaian kinerja ini sudah optimal. Target sasaran strategis ini yaitu **Nilai AKIP dengan capaian 0%, Nilai Reformasi Birokrasi dengan capaian 0%, Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian 98,67%, presentase penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian 0,00%, dan presentase penyelesaian masalah hukum dengan capaian 0,00%.**
2. Bahwa dari 11 (sebelas) indikator kinerja Polres Mempawah tersebut dapat dicapai dengan segenap kapasitas kemampuan organisasi Polres Mempawah melalui semangat, soliditas kerja sama dan kerja keras serta komitmen seluruh personel Polres Mempawah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya masing-masing dalam mengimplementasikan program kerja sesuai dengan agenda reformasi birokrasi Polri, khususnya dalam pembangunan zona integritas menuju Polres Mempawah sebagai menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 3. Selanjutnya menyangkut mekanisme pencapaian kinerja satuan kerja di lingkungan Polres Mempawah akan selalu dimonitor dan dipacu, dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, rapat teknis, koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi hubungan tata cara kerja baik pada Subsatker atau Polsek maupun hubungan personal antar personel, sehingga terjalin networking yang satu visi dan misi Polres Mempawah dalam merealisasikan program, kebijakan dan strategi menjadi kegiatan Subsatker dan Polsek, mendorong pelaksana program untuk memahami dan mengaktualisasikan tugas, fungsi dan peran dalam organisasi Polres Mempawah, sehingga setiap tahun anggaran setiap indikator kinerja utama menjadi tercapai dengan optimal.

B. Saran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada tingkat Polres dan Polsek dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas personel Polri serta memberikan petunjuk dan arahan, guna mewujudkan kinerja yang profesional dan proposional dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri khususnya Polres Mempawah serta meningkatkan sinergitas Polri dengan komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Polres Mempawah pada triwulan I T.A. 2023 agar berupaya mempertajam arah kebijakan dari visi Polri saat ini, yakni terwujudnya Mempawah yang aman dan tertib, baik secara umum berupaya meraih dukungan dan kepercayaan publik dan secara khusus menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Mempawah, lebih fokus pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilandasi gerakan revolusi mental, melalui kebijakan internal bahwa semua personel Polres Mempawah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran harus proaktif, patnership dan problem solving;
3. Meningkatkan dalam mengajukan penambahan Almatsus Polri sesuai standar spesifikasi /tipologi maupun Almatsus lainnya untuk Polres Mempawah tercapai 3 bulan dari target 100%, sesuai program dan pendistribusian oleh Mabes Polri belum mencukupi di tingkat Polsek dan Polsubsektor jajaran Polres Mempawah baru terealisasi sebanyak 50%
4. Adapun kebijakan internal Polres Mempawah dibangun atas dasar soliditas internal dengan memberikan reward and punishment yang tepat, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ramah, cepat, tepat akuntabel, tidak menyulitkan masyarakat, kreatif dan inovatif; meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui kunjungan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh kearifan lokal, serta response time ke TKP; melakukan patroli dalam skala besar, mengaktifkan kring serse, optimalisasi peran fungsi Binmas/Bhabinkamtibmas; penegakan hukum seara tegas dan terukur melalui penyidikan secara ilmiah, profesional, transparan dan akuntabel serta peka terhadap masalah kontijensi; kelola media/trending topic dengan memaksimalkan cyber troops Polres Mempawah; serta kondisikan dukungan terhadap Polri melalui kerja sama dengan TNI/stakeholders/komunitas tokoh masyarakat.
5. Khusus dalam teknis terhadap pemantauan capaian kinerja, Polres Mempawah beserta seluruh satuan kerja secara berkelanjutan setiap triwulannya bersama-

sama melakukan kegiatan diseminasi terhadap capaian kinerja Polres Mempawah, guna memonitor dan mengevaluasi terhadap capaian dari target kinerja triwulan I T.A. 2023, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Disamping itu meningkatkan jalur koordinasi dan konsolidasi dalam mengimplementasikan kebijakan Polres Mempawah sebagai fokus bersama semua organ satuan kerja Polres Mempawah untuk berkomitmen melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Demikian Laporan Anev capaian kinerja triwulan I T.A. 2023 disusun, kiranya dapat digunakan Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya serta bagi para Kasubsatker dan Kapolsek agar dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja T.A. 2023.

Mempawah, 5 April 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH



FAUZAN SUKMAWANSYAH, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030875